

LAPORAN
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan
di Perkotaan**

Erna Setijanigrum, S.I.P, MSi
Dra. Retno Andriati, M.A
Drs. Didid Soepoyo, Msi

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Nomor : 276/H3/KR/2009

Universitas Airlangga
2009

Bidang Ilmu Sosial

LAPORAN
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2009



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

kk-2
kkB
LP. 27/10
Set.
P.

**Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan
di Perkotaan**

Erna Setijaningrum, S.I.P, MSi
Dra. Retno Andriati, M.A
Drs. Didid Soepoyo, Msi

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Nomor : 276/H3/KR/2009

Universitas Airlangga
2009

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :

Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Erna Setijaningrum
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. NIP : 132 255 148
 d. Pangkat/Golongan : Penata / III C
 e. Jabatan fungsional : Lektor
 f. Bidang Keahlian : Pemberdayaan Masyarakat
 g. Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
 h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

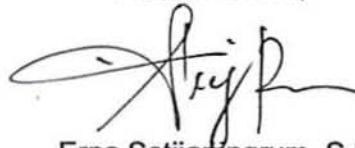
No	Nama Peneliti	Bidang Keahlian	Fakultas / Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Dra Retno Andriati, MA	Antropologi Budaya	Fisip/Antropologi	Unair
2	Drs. Didid Soepoyo, M.Si	Ekonomi Pembangunan	Fisip/AN	Unair

3. Pendanaan dan jangka waktu

- a. Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun
 b. Pembiayaan yang diusulkan : Rp.100.000.000,00
 c. Biaya yang disetujui : Rp. 80.000.000,00

Surabaya, Oktober 2009

Ketua Peneliti,



Erna Setijaningrum, S.I.P, MSi
 NIP 132 255 148

Mengetahui,
 Dekan Fisip Unair



Drs. I Basis Susilo, MA
 NIP 130 937 977

Mengetahui,
 Ketua Lembaga Penelitian



Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA., drh
 NIP 131 837 004



Ringkasan

Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki masalah kemiskinan akibat urbanisasi. Masyarakat miskin ini memunculkan kantong-kantong kemiskinan yang bertebaran hampir merata di seluruh kawasan kota Surabaya. Kawasan utara kota Surabaya teridentifikasi lebih banyak titik-titik kawasan kumuhnya dibandingkan dengan kawasan lainnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun RTRW Kota Surabaya Tahun 2007, kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh di Surabaya utara yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, Moro Krembangan.

Masalah kemiskinan perkotaan yang disebabkan kedatangan para urban ini menimbulkan masalah seperti pengangguran, kriminalitas, keindahan kota, dan berbagai macam masalah kemiskinan lain yang akan menjadi beban pemerintah.

Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, berbagai program tersebut hingga saat ini masih belum terbukti bisa mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Kaum pinggiran (urban) bukan satu-satunya *the trouble maker*. Persoalan sebenarnya adalah belum adanya satu program pengentasan kemiskinan di perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi riil lapangan. Kemiskinan perkotaan yang lebih disebabkan karena persoalan urbanisasi harus diselesaikan dengan cara-cara yang spesifik. Penyelesaian cara-cara lama dengan melakukan penggusuran / pengusiran kaum urban tidak pernah bisa menyelesaikan masalah, bahkan lebih parah lagi akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Oleh karena itulah diperlukan bentuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi masyarakat urban untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah di Surabaya khususnya Surabaya Utara. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih *key person* sebagai informan awal dan selanjutnya dilakukan dengan teknik *snowball* untuk mendapatkan informan tambahan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, data sekunder dan observasi lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan hal-hal berikut : (1) Kaum urban ini membentuk komunitas / pemukiman kumuh berupa rumah padat penduduk di gang-gang kecil. Pemukiman kumuh ini ditandai dengan buruknya sanitasi berupa MCK yang tidak memadai, sampah yang dibuang sembarangan di sungai / tepi laut, air yang tidak higienis, dan rumah yang pengap karena tidak ada aliran udara bebas ; (2) Hampir semua para urban ini berasal dari suku Madura dan mereka telah tinggal di Surabaya selama puluhan tahun; (3) Sebagian besar dari urban ini tidak memiliki KTP / KK karena belum terdaftar secara resmi di

kelurahan ; (4) Sebagian besar mata pencaharian para urban ini di sektor informal seperti kuli, tukang becak, buruh lepas, PKL, pemulung, rombeng, dan pengepul barang bekas. Namun ada juga yang berwirausaha dengan membuka UKM, nelayan, dan sekaligus usaha budidaya hasil laut ; (5) Potensi-potensi yang dimiliki para urban adalah : (a) Pengusaha pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas) terdapat di kelurahan Ujung, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding dan Bulak, (b) Pengrajin ban bekas terletak di kelurahan Bongkaran, (c) kemandirian para urban dengan mengolah hasil laut berupa kerupuk dan kerajinan terdapat di kelurahan Sukolilo, (d) pengrajin dibidang sepatu, tas dan dompet, serta nelayan terletak di kelurahan Moro Krembangan ; (6) Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemkot Surabaya seperti BLT, Raskin, Jamkesmas, Pelatihan dan Bantuan Kredit Modal, dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), hingga saat ini belum bisa dinikmati oleh kaum urban. Hal ini dikarenakan semua program tersebut diperuntukkan bagi warga Surabaya yang "resmi" / ber KTP ; (7) Terdapat lima instansi yang melakukan program pemberdayaan masyarakat yaitu Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Disperindag, dan Disnaker ; (8) Hingga saat ini masih belum ada program pemberdayaan yang khusus diperuntukkan bagi para urban di Surabaya Utara ; (9) Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah kota Surabaya terhadap kaum urban ini karena (a) tidak adanya anggaran khusus, (b) kekhawatiran akan semakin banyak terjadi urbanisasi bila para urban diberi fasilitas dan program khusus, (c) instansi terkait masih mengutamakan pemberantasan kemiskinan untuk kelompok miskin warga Surabaya asli.

Dari semua data yang diperoleh, maka diperlukan suatu bentuk pemberdayaan yang khusus sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka. Model Pemberdayaan tersebut berupa pelatihan dan pinjaman modal, pelatihan wirausaha, dan program padat karya. Sedangkan saran yang bisa diberikan yaitu bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Surabaya utara diperlukan keseriusan dari instansi terkait serta kerjasama yang baik dengan para *stakeholders*. Selain itu, pihak kelurahan beserta RT dan RW setempat harus berinisiatif untuk melakukan pendataan para urban dan memberi fasilitas / kemudahan untuk mengurus administrasi.

Summary

Surabaya is one of the city that have some problem with poverty caused of urbanization. Its poor society emerge a unique place of poverty that spread over in Surabaya. North Surabaya have more number of poverty than others place in Surabaya. Base on report from RTRW (team of planed of city ini Surabaya) in 2007, the villages that have poverty area in Surabaya are Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, .Moro Krembangan.

Some problem of poverty that caused urbanization are unemployment, criminalal, scenery of city, and others problem that make burden for local government.

Actually, some programs for attach of poverty have done by local and center government. Unforetunately, these program can't to overcome some problem of poverty in Surabaya. Urban society is not one only the trouble maker. The real problem is there isn't program for attach poverty that compatible with riil condition. Poverty of city is caused by urbanization problem so that have to attach with a specific method. Hauling strategy to overcome urbanization problem proved never fight down, but have emerged a new problem. Realizing this fault, have to look for a model of empowerment to attach poverty

From conducted research hence can be concluded that : (1) Society of urban live in a dirty area with a bad sanitation and rubbish; (2) Most of all these society of urban fro Madura and have been live in Surabaya for a long time; (3) Most of all society of urban have no a legal identity. ; (4) Most of all urban society work in informal sector; (5) Some potential of urban society are (a) collecting trace goods, (b) home industry (tire and fish, shoes); (6) Some program to attach poverty that have done by local government are BLT, Raskin, Jamkesmas, training, loan, and rehabilitation of house (RSDK), but these programs can't overcome the problem of poverty.; (7) There are five departemens taht conduct these program (Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Disperindag, and Disnaker) ; (8) There is no specific program to overcome poverty in north Surabaya ;(9) Some reasoning are : (a) there is no budget, (b) anxious about increase of urban arrival in Surabaya if local government give some attantion, (c) department stil attach poverty for legal society of Surabaya

From of all data, needed one of specific empowerment model to overcome poverty in north Surabaya, compatible with potential and characteristic of urban society. This empowerment model consist of training, loan, and employment program. While suggestion given by researcher is (1) poverty in north Surabaya can attach if local governance serious to do it and have to cooperation with stakeholders ; (2) lowest government (in village) like RT / RW have to give a legal identiy to urban society

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, akhirnya penelitian Strategi Nasional dengan judul “ Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan” ini akhirnya dapat kami selesaikan.

Keberhasilan penelitian ini karena kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Sektiari, sebagai ketua lembaga penelitian Unair
2. Seluruh staf Lembaga Penelitian Unair
3. Kepala Kelurahan, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, dan Kasi Pemerintahan dari sepuluh kelurahan (Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, dan Moro Krembangan)
4. Ibu Pungky, Kasubbid Ketahanan Ekonomu dari Dinas Pemberdayaan
5. Bapak Hermanto Kasi rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat, dari Dinas Sosial
6. Bapak Junjungan Simanjuntak, Kasi Penempatan Tenaga kerja dari Dinas Ketenagakerjaan
7. Ibu Nana, Kasi UKM dari Dinas Koperasi
8. Bapak Eko, Kasi Industri Kecil Menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Para Mahasiswa yang telah membantu di lapangan.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu terselesaikannya penelitian ini.

Karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kekurangan yang ada didalamnya membuka peluang bagi siapapun untuk memberikan masukan dan kritik agar karya ini lebih baik.

Harapan peneliti semoga laporan ini bisa menjadi masukan dan bahan kajian bagi siapapun yang interest terhadap masalah kemiskinan perkotaan. Akhir kata, semua saran ataupun kritik dari berbagai pihak dengan senang hati peneliti akan menerimanya.

Surabaya, Oktober 2009

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI



LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR FOTO	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 . Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan	4
II.2. Kemiskinan Perkotaan	6
II.3. Urbanisasi	7
II.4. Pemberdayaan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	
III.1. Tujuan Penelitian	12
III.2. Manfaat Penelitian	12
BAB IV METODE PENELITIAN	
IV.1. Tipe Penelitian	14
IV.2. Lokasi Penelitian	15
IV.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	15
IV.4. Teknik Pengumpulan Data	16
IV.5. Teknik Keabsahan Data	17
IV.6. Analisis Data	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
V.1. Profil Kawasan Kumuh di Surabaya Utara	
1. Kelurahan Ujung	20
2. Kelurahan Bulak Banteng	24
3. Kelurahan Wonokusumo	28
4. Kelurahan Sidotopo Wetan	31
5. Kelurahan Tanah Kali Kedinding	34
6. Kelurahan Bulak	38
7. Kelurahan Dupak	40
8. Kelurahan Bongkaran	44

9. Kelurahan Sukolilo	47
10. Kelurahan Moro Krembangan	49
V.2. Pola Penyebaran Wilayah Kumuh di Surabaya Utara.....	59
V.3. Model Pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya	61
V.4. Pengembangan Model Pemberdayaan masyarakat	77

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan	83
VI.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 1 : Profil Kawasan Kumuh di Surabaya Utara	54
Tabel 2 : Potensi dari Kaum Urban di Surabaya Utara	57
Tabel 3 : Program Pemberdayaan Kemiskinan oleh Pemkot Surabaya.....	69
Tabel 4 : Perhatian Pemkot Terhadap Kaum Urban di Surabaya Utara	76
Tabel 5 : Model Pemberdayaan Bagi Para Urban di Surabaya Utara	80

Daftar Gambar

Gambar 1	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Ujung	21
Gambar 2	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bulak banteng	25
Gambar 3	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo	29
Gambar 4	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Sidotopo Wetan.....	32
Gambar 5	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Tanah Kali Kedinding	35
Gambar 6	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bulak.....	38
Gambar 7	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Dupak.....	41
Gambar 8	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran	45
Gambar 9	: Denah lokasi pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo.....	47
Gambar 10	: Denah pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan.....	50
Gambar 11	: Peta Wilayah Kumuh / Urban di Surabaya	59
Gambar 12	: Peta Wilayah Kumuh di Surabaya Utara	60

Daftar Foto

Foto 1 : Pemukiman kumuh di kelurahan Ujung	23
Foto 2 : Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bulak Banteng	26
Foto 3 : Pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo	30
Foto 4 : Pemukiman kumuh di kelurahan Sidotopo Wetan.....	33
Foto 5 : Pemukiman kumuh di kelurahan Tanah Kali Kedinding.....	36
Foto 6 : Pemukiman kumuh di kelurahan Bulak	39
Foto 7 : Pemukiman kumuh di kelurahan Dupak.....	42
Foto 8 : Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran	46
Foto 9 : Kondisi Pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo.....	48
Foto 10 : Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan	52

Daftar Bagan

Bagan 1	: Siklus Penelitian Interaktif	18
Bagan 2	: Desain Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat	82

BAB I PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

I.1. Latar Belakang Masalah

Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki masalah kemiskinan akibat urbanisasi. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), angka kemiskinan dari tahun 2005-2007 terus mengalami kenaikan. Mulai 111.233 KK (atau 377.832 jiwa) pada tahun 2005, 113.129 KK (atau 379.269 Jiwa) pada tahun 2006, dan 126.724 KK (431.331 jiwa) pada tahun 2007.

Masyarakat miskin ini memunculkan kantong-kantong kemiskinan yang bertebaran hampir merata di seluruh kawasan kota Surabaya. Kawasan utara kota Surabaya teridentifikasi lebih banyak titik-titik kawasan kumuhnya dibandingkan dengan kawasan lainnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun RTRW Kota Surabaya Tahun 2007, kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh di Surabaya utara yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, Moro Krembangan.

Masalah kemiskinan perkotaan yang disebabkan kedatangan para urban ini menimbulkan masalah seperti pengangguran, kriminalitas, keindahan kota, dan berbagai macam masalah kemiskinan lain yang akan menjadi beban pemerintah. Cara Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan kedatangan para urban ini biasanya dilakukan dengan menggusurnya. Namun, pada kenyataannya, penggusuran justru menciptakan masalah sosial perkotaan yang semakin akut dan pelik. Penggusuran atau sering diistilahkan sebagai peremajaan kota ternyata merupakan cara yang tidak berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.

Pemberdayaan, merupakan *strategy* pengentasan kemiskinan yang melibatkan peran aktif *target group* dalam suatu program. Pemberdayaan yang diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan perkotaan harus dirancang secara unik berdasarkan karakteristik yang melekat pada kaum urban seperti bekerja di sektor informal, skill rendah, tingkat pendidikan rendah, memiliki anggota keluarga dalam jumlah besar, sanitasi yang buruk, kurang kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan, rentan terhadap penyakit, tidak memiliki identitas warga negara yang resmi (KTP), dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik para urban agar upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan bisa berhasil dan tepat sasaran.

Sebenarnya sudah banyak program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) untuk bidang kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terakhir Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pemerintah tahun 2007 untuk bidang kesehatan dan pendidikan, 50% dari jumlah penerima bantuan ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Jatim. Dari sekitar 500.000 RTSM penerima bantuan di tujuh propinsi di Indonesia, 250.000 di antaranya untuk warga sangat miskin di Jatim. Yang terbaru, diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Selain itu, masih ada program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah propinsi seperti Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardutaskin) yang pernah dilaksanakan, Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), yang sekarang digantikan dengan Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES). Bahkan, satu keluarga miskin bisa

mendapatkan bantuan dari beberapa program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

Namun, berbagai program tersebut hingga saat ini masih belum terbukti bisa mengentaskan kemiskinan di perkotaan. Kaum pinggiran (urban) bukan satu-satunya *the trouble maker*. Persoalan sebenarnya adalah belum adanya satu program pengentasan kemiskinan di perkotaan yang disesuaikan dengan kondisi riil lapangan. Kemiskinan perkotaan yang lebih disebabkan karena persoalan urbanisasi harus diselesaikan dengan cara-cara yang spesifik. Penyelesaian cara-cara lama dengan melakukan penggusuran / pengusiran kaum urban tidak pernah bisa menyelesaikan masalah, bahkan lebih parah lagi akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit.

Penyelesaian yang sesuai adalah dengan cara memberdayakan kaum urban ini dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, program pengentasan kemiskinan di perkotaan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat (urban) dengan mengacu pada karakteristik khusus yang melekat pada kaum urban. Dengan demikian akan diperoleh desain pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan yang tepat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemiskinan di perkotaan yang disebabkan karena membanjirnya urbanisasi?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan

Belum ada kata sepakat tentang definisi kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh definisi berikut. Salah satu definisi yang sering dipakai untuk menggambarkan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang baik yang mencakup material maupun non material (Reitsma dan Kleinpenning, 1985). Di Indonesia, definisi tersebut pernah dinyatakan sebagai "*the inability of individual to meet his basic needs*" (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Definisi seperti ini memberi peluang terhadap interpretasi yang bisa tidak tepat karena ketidakmampuan tersebut biasanya diukur dalam bentuk "uang", dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya matapencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Apalagi konsep kebutuhan dasar nampaknya juga masih belum dapat diterima secara umum karena tidak hanya berbeda antar individu yang satu dengan yang lain, tetapi juga berbeda antar ruang dan waktu.

Adapun dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang disusun oleh Bappenas dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) kemiskinan didenifisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Sumardjan (1997) membedakan 4 (empat) pola kemiskinan, yaitu (1) kemiskinan individual, kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang disandang oleh seseorang individu mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan; (2) kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang dilihat dengan membandingkan antara taraf kekayaan material dari keluarga-keluarga atau rumahtangga di suatu komunitas; (3) kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang disandang oleh suatu golongan yang "*built in*" atau menjadi bagian yang seolah-olah tetap dalam struktur suatu masyarakat; dan (4) kemiskinan budaya, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standard tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yakni nilai pengeluaran konsumsikebutuhan dasar makanan setara 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Dalam Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud masyarakat miskin umumnya ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam beberapa hal, yaitu : (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, (2) ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif, (3) ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi, (4) ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatif dan fatalistic, dan (5) ketidakmampuan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa memiliki martabat dan harga diri yang rendah.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap, dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas, dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Menurut Chambers inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation* trap atau perangkap kemiskinan.

Secara rinci, deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu: kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini sering kali saling berkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkat kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Dari kelima dimensi diatas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian yang utama.

II.2. Kemiskinan Perkotaan

Setidaknya terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai kaum miskin kota. Pertama adalah Teori Marjinalitas, sedangkan yang kedua adalah Teori Ketergantungan. Kaum miskin kota, dalam Teori Marjinalitas yang menjelaskan tentang pemukiman kumuh, melihat bahwa kaum miskin sebagai penduduk yang secara sosial, ekonomi, budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan masyarakat kota. Secara sosial, memiliki ciri-ciri yang mengungkapkan adanya disorganisasi internal dan isolasi eksternal. Secara budaya, mereka mengikuti pola hidup tradisional perdesaan dan terkungkung dalam "budaya kemiskinan". Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak menyerap sumber daya kota daripada menyumbangkannya, boros, konsumtif, cepat puas, tidak berorientasi pasar, tidak berjiwa wiraswata, memproduksi secara pas-pasan. Secara politik, mereka berwatak apatis, tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik revolusioner karena frustrasi, disorganisasi sosial dan ketidakpastian yang mereka alami.

Sebaliknya, dalam Teori Ketergantungan, masyarakat miskin kota tersebut dilihat sebagai pendatang miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat ambil bagian dalam sektor formal. Satu-satunya kemungkinan bagi mereka adalah bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, pedagang kecil, pemulung sampah yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Secara budaya, mereka juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan golongan lain seperti ingin hidup lebih baik, kerja keras, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi, di mata golongan yang berkuasa, mereka

dipandang rendah, sumber malapetaka kota seperti kejahatan, pelacuran, dan kekotoran. Secara ekonomis, mereka lebih banyak memberi daripada menerima. Merekalah yang membersihkan dan memanfaatkan sisa-sisa konsumsi golongan lain dalam masyarakat kota (Sudjatmoko, 2003).

Dengan melihat konteks perkotaan di negara-negara berkembang, jelaslah bahwa Teori Ketergantungan lebih cocok untuk menjelaskan kemiskinan di perkotaan dibandingkan dengan Teori Marjinalitas (Darwis Khudori, 2002). Teori Ketergantungan yang menggambarkan kaum miskin kota sebagai warga kota yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kaum miskin kota berada pada sektor informal. Hal ini menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara kemiskinan perkotaan yang terjadi dengan sektor informal. Sektor informal sering kali dikaitkan dengan kaum miskin kota yang tidak terdidik sehingga kaum miskin tersebut hanya mampu bekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

II.3. Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya (wikipedia.com)

Berbeda dengan perspektif ilmu kependudukan, definisi Urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. perpindahan itu sendiri dikategorikan 2 macam, yakni: Migrasi Penduduk dan Mobilitas Penduduk, Bedanya Migrasi penduduk lebih bermakna perpindahan penduduk dari desa ke

kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota. Sedangkan Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara atau tidak menetap.

Niat untuk hijrah atau pergi ke kota dari desa, seseorang biasanya harus mendapatkan pengaruh yang kuat dalam bentuk ajakan, informasi media massa, impian pribadi, terdesak kebutuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa dalam bentuk sesuatu yang mendorong atau memaksa seseorang untuk urbanisasi seperti (1) lahan pertanian yang semakin sempit, (2) merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya, (3) menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa, (4) terbatasnya sarana dan prasarana di desa, (5) diusir dari desa asal, (6) memiliki impian kuat menjadi orang kaya. Sedangkan pengaruh lain yaitu dalam bentuk yang menarik perhatian atau faktor penarik seperti (1) kehidupan kota yang lebih modern dan mewah, (2) sarana dan prasarana kota yang lebih lengkap, (4) banyak lapangan pekerjaan di kota, (5) di kota banyak perempuan cantik dan laki-laki ganteng, (6) pengaruh buruk sinetron Indonesia, (7) pendidikan sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih baik dan berkualitas. (Bintarto, 1993)

Michael Lipton (1977) mengatakan, orang berurbanisasi merupakan refleksi dari gejala kemandekan ekonomi di desa yang dicirikan oleh sulitnya mencari lowongan pekerjaan dan fragmentasi lahan (sebagai faktor pendorong), serta daya tarik kota dengan penghasilan tinggi (sebagai faktor penarik). Dengan begitu, faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*) sama-sama menjadi determinan penting dalam proses urbanisasi tersebut. Karena itu, urbanisasi sebetulnya menjadi pilihan yang rasional bagi penduduk di dalam usaha mendapatkan pendapatan yang lebih baik dibandingkan sewaktu mereka tetap bertahan di desa.

Urbanisasi tersebut akan menimbulkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran, yang diikuti dengan meluasnya aktivitas sektor informal di kota. Ini akan mengakibatkan kualitas hidup para

migran menjadi minim, dan kebanyakan mereka hanya mampu hidup secara subsistem. Kondisi ini pada gilirannya akan menimbulkan gejala kemiskinan yang memunculkan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan berupa pemukiman kumuh yang tersebar di berbagai wilayah perkotaan.

II.4. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kita harus menempatkan konsep pemberdayaan tidak hanya secara individual akan tetapi juga secara kolektif (*individual self empowerment* maupun *collective self empowerment*), dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. (Proserpina, 2003)

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua, atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Menurut Indrasari Tjandraningsih (Dalam Prawirakusumah, 2001)), mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan

masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*".

Untuk pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi (Kartasasmita, 1996), yaitu: *pertama*, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, informasi, modal, lapangan kerja, pasar dan pengadaan infrastruktur yang memadai. *Ketiga*, pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Melindungi berarti mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Untuk itu, perlu program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan ini.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung kepada program-program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Sumodiningrat, 1999).

Berdasarkan konsep di atas menurut Kartasasmita (1996), dapat dikembangkan berbagai pendekatan:

- a. Upaya pemberdayaan harus terarah (*targetted*), ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah sesuai kebutuhannya. Program ini harus langsung mengikutsertakan masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, dengan tujuan supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

- b. Pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat kurang berdaya, sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien.
- c. Kelompok pendamping, untuk membantu mereka dalam memperbaiki kesejahteraannya. Fungsi kelompok pendamping adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat, sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membantu mencari cara pemecahan masalah.

Kartasmita (1996) menekankan pemberdayaan yaitu memberi peran kepada lapisan bawah dalam proses-proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah. Pemerintah berperan untuk mengurangi hambatan dan kendala partisipasi masyarakat dan menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus bersifat multidimensional dan bersama-sama. Karena dalam kenyataan mereka yang tidak berdaya secara ekonomi hampir secara otomatis tidak berdaya secara sosial, politik, budaya dan hukum (Oscar, 2004).

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1 Tujuan Penelitian :

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah berusaha untuk melakukan pemihakan pada kaum miskin di perkotaan (kaum urban) dengan mengupayakan agar kaum urban bisa eksis dan bertahan hidup di kota besar secara layak dan selanjutnya bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan kota. Dengan demikian kaum urban ini tidak lagi dianggap sebagai penyebab utama permasalahan kemiskinan di perkotaan dan menjadi beban pemerintah, namun justru kaum urban ini menjadi aset positif yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini berupaya mencari / mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kaum urban untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan.

III.2. Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Pemerintah daerah (kota) bisa menemukan solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan perkotaan yang disebabkan karena kedatangan kaum urban dalam jumlah yang relatif cukup besar.
- b. Meminimalkan beban pemerintah daerah (kota) sebagai akibat berbagai persoalan yang muncul akibat dampak kemiskinan perkotaan seperti pengangguran, kriminalitas, putus sekolah, keindahan tata kota, kesehatan, dan lain-lain.

- c. Kaum urban bisa eksis dan bertahan hidup di kota secara layak. Artinya, mereka tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah, namun bisa hidup secara mandiri.
- d. Kaum urban bisa menjadi aset berharga bagi pemerintah daerah (kota) karena telah ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah (Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982). Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah (a) Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alamiah sebagai sumber penelitian dan peneliti adalah instrumen kunci; (b) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah dalam wujud gambaran kata-kata, dan bukannya nomor; (c) Penelitian kualitatif mempunyai kaitan dengan proses bukannya secara sederhana dengan produk atau hasilnya; dan (d) Pendekatan kualitatif lebih mementingkan "makna".

IV.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian Eksplanatif. Menurut Mely G. Tan, penelitian yang bersifat eksplanatif bukan saja hanya mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga bertujuan untuk mencari penyebab timbulnya suatu gejala sosial tertentu serta mencari hubungan antar gejala-gejala atau faktor-faktor yang muncul dalam fenomena sosial tersebut (Koentjaraningrat, 1985 : 32).

Senada dengan pernyataan tersebut, Manasse Malo menyatakan bahwa tipe penelitian eksplanatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud tidak hanya memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan tetapi hubungan dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa serta bagaimana sampai timbul gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan penelitian (Manasse Malo, 1986:32).

IV.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah di Surabaya khususnya Surabaya Utara. Hal ini dikarenakan Surabaya adalah salah satu kota yang menghadapi permasalahan kemiskinan yang diakibatkan membanjirnya kedatangan para urban. Sedangkan pemukiman para urban terdeteksi berada di Surabaya Utara.

IV.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di perkampungan kumuh di 10 kelurahan (Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, dan Moro Krembangan) dan pegawai instansi terkait (kelurahan, Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih *key person* sebagai informan awal dan selanjutnya dilakukan dengan teknik *snowball* untuk mendapatkan informan tambahan. *Key person* dari masyarakat yang dipilih adalah ketua RT / RW, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya berdasar rekomendasi dari mereka ini akan dipilih beberapa warga yang ada di pemukiman kumuh yang dianggap bisa memberikan informasi tambahan. Sedangkan *key person* dari instansi terkait yaitu ; (1) kelurahan diwakili oleh sekretaris kelurahan, Kasi Kesra, Kasi Pembangunan, dan Kasi Pemerintahan, (2) instansi terkait yaitu Dinas pemberdayaan oleh ibu Pungky (Kasubbid Ketahanan Ekonomu), Dinas Sosial oleh bpk Hermanto (Kasi rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat), Dinas Ketenagakerjaan oleh bpk Junjungan Simanjuntak (Kasi Penempatan Tenaga kerja), Dinas Koperasi oleh ibu Nana (Kasi UKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh bpk Eko (Kasi Industri Kecil Menengah).

IV.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya (Moleong 1996). Teknik atau cara dalam pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Interview ; Wawancara dalam penelitian digunakan sebagai cara pengumpulan data atau informasi yang utama. Dengan wawancara peneliti bisa mendapatkan dua hal, pertama menggali apa yang diketahui atau dialami subyek yang diteliti. Kedua, apa dipertanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang sifatnya lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur secara mendalam (*indepth interview*). Dengan menggunakan teknik ini diharapkan diperoleh informasi yang akurat dengan responden karena bertatap muka dan mengadakan pembicaraan langsung. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan nara sumber kaum urban yang berada di kantung-kantung kumuh di Surabaya dan aparat dinas terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
2. Data sekunder ; Alat pengumpul datanya disebut form pencatat dokumen dan sumber datanya beberapa catatan atau dokumen yang tersedia. Sumber data dapat berupa catatan resmi (*official of formal records*) dan juga sumber sekunder (*secondary resources*) yaitu berupa dokumen-dokumen ekspresif (*expressive document*) seperti biografi, surat-surat, serta laporan media massa (*mass media reports*) baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Dalam penelitian ini informasi yang diambil dari dokumen / catatan resmi (misalnya dokumen yang ada di Dinas terkait), maupun dokumen / catatan yang diperoleh dari tempat lain (jurnal, surat kabar, internet, dll).
3. Observasi lapangan ; Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses,

atau perilaku. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan guna memperkuat hasil studi wawancara dan dokumenter, juga dapat melihat kenyataan di lapangan apa adanya. Sebab bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan pada lokasi kaum urban di 10 kelurahan.

IV.5. Teknik Keabsahan Data

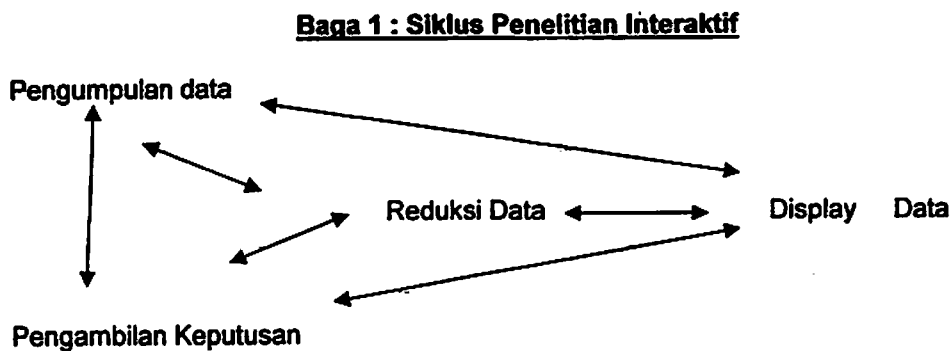
Pemakaian teknik keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu hasil penelitian secara praktis dan ilmiah. Dengan kata lain apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan, maka jelas bahwa hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipergunakan adalah dengan penciptaan *rapport* dan melakukan *triangulasi* sebagai berikut :

- Menciptakan *rapport* ; pada tahap ini peneliti berusaha menciptakan suatu situasi psikologis yang membuat informan bersedia bekerjasama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikirannya dan keadaan sebenarnya.
- Melakukan *triangulasi* ; yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Sedangkan teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

IV.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh peneliti secara kualitatif sejak peneliti turun ke lapangan. Artinya, analisis tidak hanya dilakukan pada saat data dari wawancara sudah terkumpul lengkap tetapi sejak proses penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Setelah data ditranskripkan dengan lengkap, didukung dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian maka langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis mencakup tiga langkah seperti bagan berikut :



Sumber : Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (1992)

Sesuai dengan model teknik analisis diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dalam tiga tahap setelah pengumpulan data, yaitu :

1. Reduksi Data ; proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar, membuang hal yang tidak perlu, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data ; penyusunan semua informasi dalam bentuk tabel atau narasi.

- 3. Menarik Kesimpulan ; penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data. Secara ringkas teknik analisis yang dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya menjadi uraian yang mudah dibaca dan dimengerti.**

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan temuan-temuan data di lapangan serta pembahasan untuk menjawab permasalahan tentang pengembangan model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan yang disebabkan karena membanjirnya urbanisasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penelitian ini dilakukan di 10 kelurahan kawasan kumuh di Surabaya utara, dan di lima instansi pemerintah kota Surabaya. Wawancara dilakukan terhadap 323 orang informan (15 petugas kelurahan, 8 pegawai instansi, 18 RT, 47 RW, dan 235 warga pemukiman kumuh. Berikut, adalah hasil temuan data di lapangan dan pembahasannya.

V.1. Profil Kawasan Kumuh di Surabaya Utara

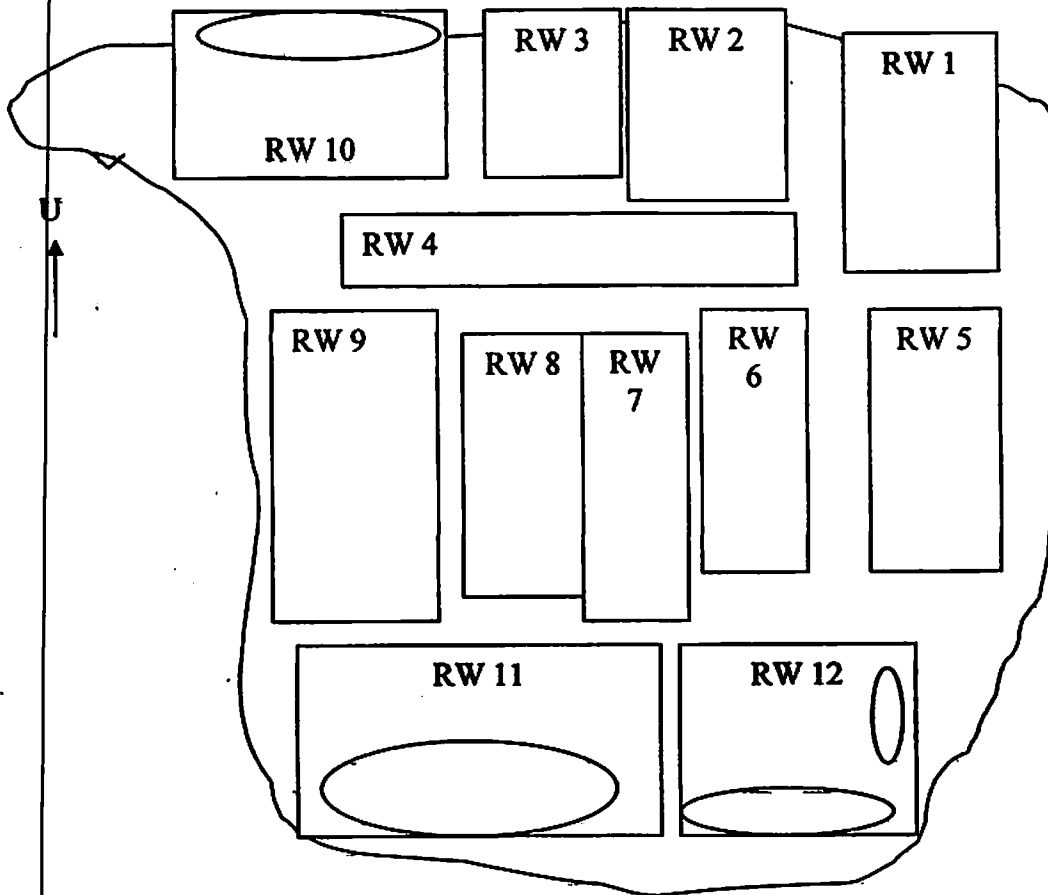
Kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh di Surabaya utara yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, Moro Krembangan. Berikut, adalah profil masing-masing kelurahan tersebut yang akan bisa menggambarkan keadaan riil kawasan kumuh :

1. Kelurahan Ujung

Kelurahan Ujung terletak dikecamatan Semampir. Sebelah utara kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan perak Utara, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Ampel, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Perak Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Pegirian. Jumlah penduduk di kelurahan ini ialah 32.854 jiwa atau 6947 KK yang tersebar di 12 RW dan 108 RT.

Lingkungan kumuh di kelurahan ini terdapat di RW 10, RW11, dan RW 12. Jumlah penduduk di RW 10 berjumlah sekitar 3000 jiwa. Jumlah penduduk di RW 11 berkisar 4350 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di RW 12 berkisar 7120 jiwa. Jadi total semua sejumlah 14.470 jiwa. Daerah asal para urban ini mayoritas berasal dari Madura, dan mereka menempati daerah itu sudah puluhan tahun.

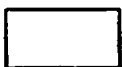
Gambar 1 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Ujung



Ket :



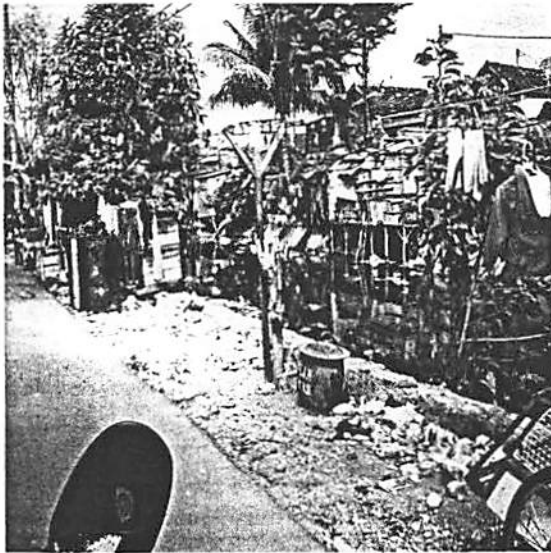
Wilayah pemukiman kumuh



Wilayah pemukiman non kumuh

Mata pencaharian mereka cukup beragam. Di RW 10, mata pencaharian para urban mayoritas ialah buruh peti kemas, karena dikelurahan ini terdapat terminal peti kemas. Selain itu juga, para urban diwilayah ini bekerja sebagai PKL, tukang becak dan tukang rombeng. Di RW 11 dan RW 12, mayoritas mata pencaharian para urban ialah tukang rombeng, dan PKL. Anak-anak para urban ini telah menikmati bangku sekolah, namun sekitar 30% hanya menamatkan pendidikannya hingga SMP saja. Kendalanya ialah mahalnya biaya pendidikan, disisi lain mereka lebih baik bekerja menghasilkan uang daripada harus bersekolah. Beberapa dari kaum urban pun ada yang menganggur ataupun tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kondisi lingkungan di RW 10,11,12 cukup kumuh. Terdapat pemukiman padat penduduk, yang dihubungkan dengan gang-gang yang cukup sempit, yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor yang harus dituntun. Seluruh rumah telah dialiri aliran listrik. Namun tidak semua rumah telah memakai air PAM. Sebagian para urban masih memakai air sumur. Terdapat juga WC umum, yang nampaknya didesain untuk kebutuhan beberapa warga. Artinya di beberapa rumah tidak terdapat WC ataupun jamban, sehingga mereka harus menggunakan WC umum. Pemandangan kumuh ini juga terlihat jelas bila kita melihat pinggiran sungai, dimana terdapat gubuk-gubuk semi permanen yang ditinggali oleh sekelompok warga. Sanitasi sangat buruk sekali, jauh dari kondisi kebersihan. Kondisi sungai yang kotor semakin menambah kumuhnya lingkungan. Air sungai kotor, menggenang, dan banyak tumpukan sampah dimana-mana menyebabkan bau air sungai tercium aroma menyengat yang tidak sedap. Selain itu, disekitar rel kereta api, juga banyak pemukiman kumuh yang terbuat dari gubuk-gubuk semi permanen. Mereka hidup jauh dari kelayakan dengan kondisi seadanya, kumuh, dan sanitasi buruk. Berikut, foto lingkungan kumuh di kelurahan Ujung.

Foto 1 : Pemukiman kumuh di kelurahan Ujung

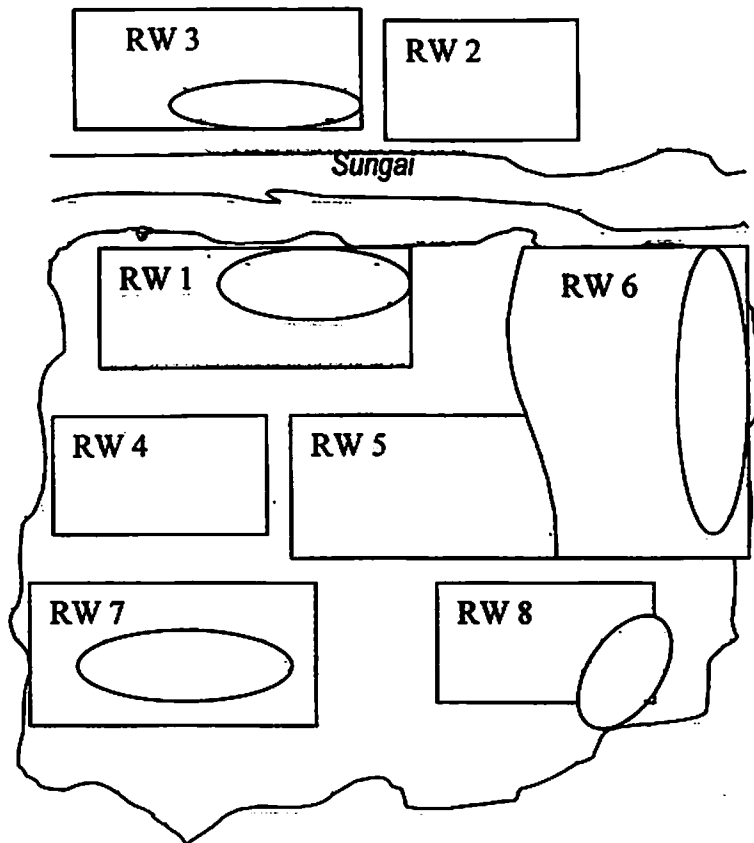
Hampir 25% penduduk diwilayah kumuh ini tidak terdaftar secara resmi di kelurahan. Hal ini terjadi karena para urban amat sulit untuk diatur, para urban tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus surat tersebut, dan lemahnya aparat RT/RW untuk berinisiatif melakukan pendataan. Padahal bila para urban terdaftar secara resmi di kelurahan, mereka akan menikmati program-program dari pemerintah seperti raskin, BLT, jamkesmas, PNPM Mandiri, dan gerdu

taskin. Namun para urban yang telah terdaftar dikelurahan ujung, mayoritas telah menikmati program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang digalakkan oleh Pemkot Surabaya seperti BLT, Jamkesmas, Gakin, Raskin, dan PNPM. Sebagian kecil lagi belum menikmatinya karena mereka tidak terdaftar dan tidak termasuk kedalam kuota penerima program tersebut.



2. Kelurahan Bulak Banteng

Lokasi Bulak Banteng merupakan daerah yang termasuk wilayah kumuh yang terdapat di daerah Surabaya Utara di Kecamatan Kenjeran dengan berbatasan untuk sebelah utara wilayah Kelurahan Tambak, sebelah selatan wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan, sebelah Barat wilayah Kelurahan Wonokusumo, dan sebelah timur Kelurahan Tambak / Selat Madura. Dengan mempunyai jumlah penduduk sekitar 20.089 jiwa dan terdiri dari delapan RW, dari delapan RW yang terdapat di Kelurahan Bulak Banteng tersebut, pola penyebaran masyarakat kumuh atau urban di kelurahan Bulak Banteng terdapat di lima RW, yakni di RW I, RW III, RW VI, RW VII, dan RW VIII, mereka mengelompok di wilayah atau di RW tersebut.

Jumlah keseluruhan warga pemukiman kumuh berkisar 662 Kepala Keluarga terbagi dalam RW I terdapat 151 Kepala Keluarga, RW III terdapat 54 Kepala Keluarga, RW VI terdapat 164 Kepala Keluarga, RW VII terdapat 191 dan RW VIII dengan jumlah 102 Kepala Keluarga. Sementara itu, RW VII merupakan wilayah yang berpenduduk paling banyak masyarakat miskinnya. Mereka rata-rata yang tinggal di wilayah Bulak Banteng ini perbandingan antara kaum laki-laki dan perempuan cukup jauh jika dibandingkan dengan prosentase yakni 10 : 2, dimana 10 untuk kaum laki-laki dan 2 untuk kaum perempuan. Berikut, gambar denah pemukiman kumuh di kelurahan Bulak Banteng.

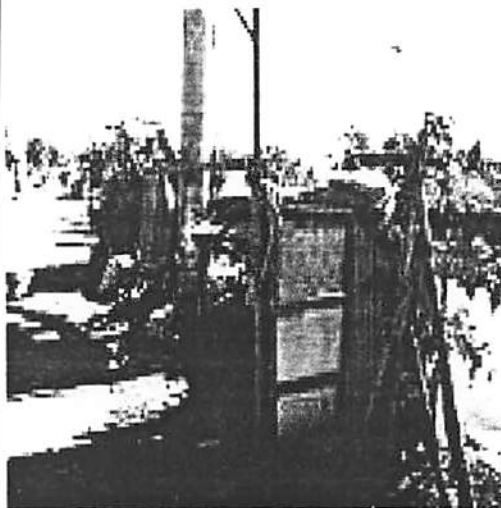
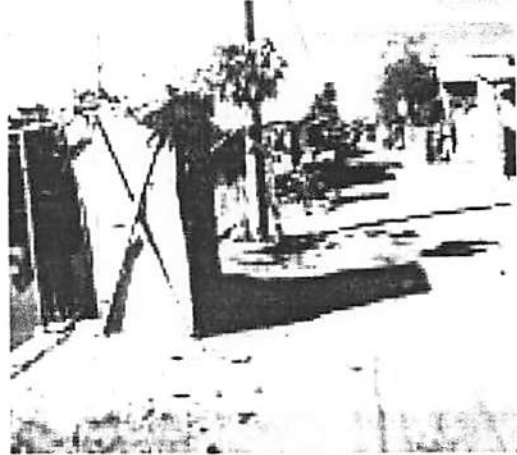
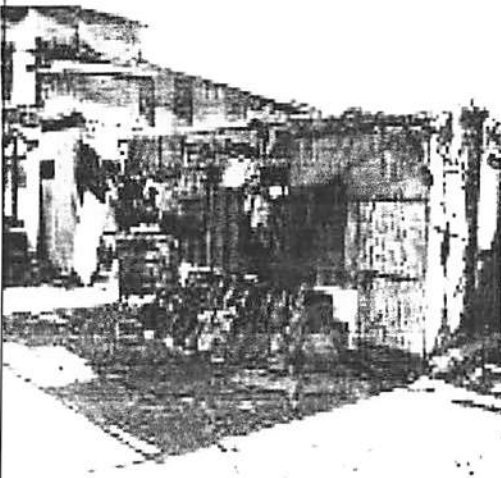
Gambar 2 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bulak banteng

Ket :

-  Wilayah komunitas kaum urban
-  Wilayah komunitas kelas menengah keatas

Secara umum kondisi lingkungan fisik di wilayah Bulak Banteng kurang layak. Dari hasil observasi lapangan terlihat sebagian besar tempat tinggal para urban masih memprihatinkan. Rumah / tempat tinggal yang mereka tempati berupa barak yang mereka dirikan di tepi sungai. Sanitasi juga sangat buruk, mandi, mencuci, dan keperluan air untuk kehidupan sehari-hari semuanya mengandalkan sungai. MCK yang tidak layak berada di tepi sungai semakin memperburuk sanitasi. Berikut, foto yang menggambarkan buruknya kondisi pemukiman kaum urban di kelurahan Bulak Banteng.

Foto 2 : Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bulak Banteng



Rata-rata kaum urban merupakan suku Madura atau biasa disebut Blok M dan rata-rata mereka sudah menetap selama puluhan tahun. Warga kaum urban atau kaum miskin di wilayah Kelurahan Bulak Banteng rata-rata bekerja seadanya atau serabutan. misal saja satu hari becak, satu hari mulung atau ngrombeng, satu hari lagi sebagai makelar. Tetapi ada juga beberapa yang bekerja sebagai wirausahawan pengepul barang bekas, disisi lain untuk para

anak-anak rata-rata bisa sekolah semua karena sesuai dengan program gratis sekolah tingkat dasar mereka rata-rata bisa menikmati hasil dari program pemerintah tersebut.

Masih banyak penduduk urban yang belum terdaftar sebagai penduduk tetap dan tidak terdaftar sama sekali baik itu data penduduk musiman maupun tetap. Menurut Sekretaris Kelurahan Bulak Banteng, rata-rata yang tidak terdaftar dalam penduduk Bulak Banteng Surabaya karena mereka sulit untuk diatur, meremehkan masalah perijinan. Selain itu, tidak adanya laporan dari warga setempat untuk datang ke RT/RW menyulitkan kelurahan untuk mendata.

Kaum urban di wilayah Bulak Banteng sebagian masih belum merasakan program yang khusus untuk penanganan masalah mereka, misal saja program pemerintah dari dinas sosial yakni program untuk bantuan kredit bagi pengusaha, mereka tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Justru mereka hanya tahu ketika bukan dari pemerintah melainkan dari swasta atau bank-bank swasta. Namun pihak dari kelurahan, sebenarnya sudah ada sosialisasi program. Demikian juga dengan program lainnya seperti program pelatihan yang dilakukan dinas ketengakerjaan berupa pelatihan otomotif yang tidak bisa mereka ikuti lebih dikarenakan tempat pelatihan program tersebut tidak dilakukan di kelurahan Bulak Banteng melainkan di disnaker) yang ditempuh dengan ongkos perjalanan. Sehingga mereka rata-rata lebih baik mencari kerja untuk kebutuhan hidupnya. Belum lagi kuota untuk program dari pemerintah, sehingga tidak tersentuh dan tersebar secara merata.

Sedangkan untuk program pemerintah lain yang ada seperti Raskin, PNPM, Jamkesmas, juga dilaksanakan. Namun tidak semua penduduk menikmatinya, karena program ini mensyaratkan warga harus memiliki identitas resmi berupa KTP. Sementara itu, warga yang tidak memiliki identitas resmi terpaksa tidak bisa menikmati program kemiskinan yang diadakan oleh pemerintah.

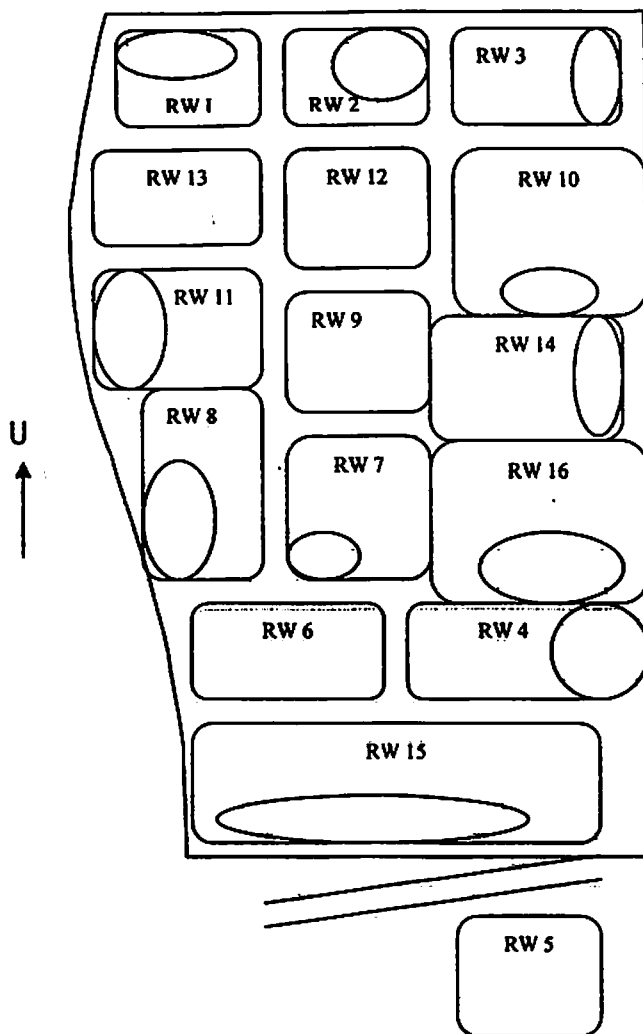
3. Kelurahan Wonokusumo

Kelurahan Wonokusumo merupakan daerah yang paling terpadat dari jumlah kelurahan yang termasuk wilayah 10 dari kelurahan daerah atau wilayah kawasan kumuh yang dilakukan oleh tim penyusun RTRW Kota Surabaya Tahun 2007. Kelurahan Wonokusumo ini masuk di Kecamatan Semampir, dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Ujung, sebelah barat Kelurahan Ujung, sebelah selatan Kelurahan Pegirian, dan sebelah timur Kelurahan Bulak Banteng.

Dengan jumlah penduduk yang sangat padat yakni 55.287 jiwa Kelurahan Wonokusumo terdiri dari 16 RW, dan 11 RW merupakan komunitas kaum miskin atau kumuh. Jumlah urban ini rata-rata sekitar 2.736 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut wilayah RW 8 merupakan wilayah paling banyak, berkisar 400 KK, sedangkan jumlah penduduk kaum urban di RW lain yakni, RW 1 dengan jumlah 253 KK, RW 2 dengan jumlah 186 KK, RW 3 dengan jumlah 269 KK, RW 6 dengan jumlah 232 KK, RW 7 dengan jumlah 333 KK, RW 10 dengan jumlah 267 KK, RW 11 dengan jumlah 213 KK, RW 14 dengan jumlah 280 KK, RW 15 dengan jumlah 117 KK dan RW 16 dengan jumlah 185 KK. Warga Wonokusumo yang kaum urban rata-rata hampir 85% berasal dari seberang pulau yakni Masyarakat Madura. Sebagian besar mereka tinggal di Surabaya sudah puluhan tahun sekitar 10 – 50 tahun.

Rata-rata penduduk urban di Wonokusumo bekerja atau bermata pencaharian harian lepas. Mereka bekerja tidak tetap, kuli bangunan, dan sebagai tukang becak. Anak-anak di pemukiman urban ini masih banyak yang tidak sekolah. Pada saat observasi, pada jam sekolah masih ada anak-anak kecil sekitar umur 9-10 tahun berkeliaran di dikelurahan setempat hal ini juga dibuktikan data survey yang ada di Kelurahan Wonokusumo jumlah anak yang tidak sekolah yakni 1.020 jiwa (anak usia 7-10 tahun). Sedangkan kaum remaja atau dewasa masih juga banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Berikut, denah pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo seperti terlihat di bawah ini.

Gambar 3 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo



Ket :  Wilayah komunitas kaum urban
 Wilayah komunitas kelas menengah keatas

Kondisi lingkungan sekitar komunitas kaum urban rata-rata tempat tinggal mereka masih di bawah kelayakan, hal ini di lihat di wilayah RW 4 yang merupakan tempat berdekatan dengan sepadan sungai (drainase), tempat

tinggal mereka masih menggunakan barak atau *gubug*. Sanitasi untuk pembuangan mengikuti aliran drainase disekitar tersebut yang sangat kotor. Di kelurahan Wonokusumo terdapat rusun di wilayah RW 4 yang sangat padat. Pemandangan kumuh juga terdapat di lingkungan padat dekat pasar wonokusumo yang rata-rata masuk wilayah RW 6. Komunitas para urban ini terlihat sangat padat dan kumuh sekali walaupun tempat bangunan mereka sudah berbeton. Berikut, foto pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo.

Foto 3 : Pemukiman kumuh di kelurahan Wonokusumo



Komunitas urban yang ada di Kelurahan Wonokusumo rata-rata masih belum terdaftar sebagai penduduk resmi. Hasil wawancara dengan RW setempat menunjukkan bahwa mereka tidak terdaftar dari penduduk Kelurahan Wonokusumo karena mereka tidak mau untuk mengurus surat pindah dari tempat tinggal sebelumnya sehingga rata-rata mereka yang datang tidak ada yang melapor ke RT/RW setempat.

Sebenarnya terdapat program untuk kesejahteraan kaum miskin dari Dinsos yakni program rehabilitasi rumah, namun program ini disalahgunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kelurahan Wonokusumo dengan memperkerjakan kaum urban yang tidak mempunyai pekerjaan. Dengan jalan ini kaum urban mendapatkan upah atau gaji dari proyek pembangunan tersebut. Pelatihan keterampilan juga pernah diadakan di kelurahan Wonokusumo namun baru hanya satu kali dalam setahun terakhir berupa pelatihan wirausaha bagi karang taruna atau remaja yang hanya diikuti sebagian kecil peserta. Capaian dari program tersebut masih belum efektif, meskipun pihak kelurahan sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan di sektor bidang yang lain seperti PNPM, Jamkesmas, raskin sudah dilaksanakan. Namun kenyataan di lapangan, semua program tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh warga karena harus bisa menunjukkan bukti sah kewarganegaraan berupa KTP

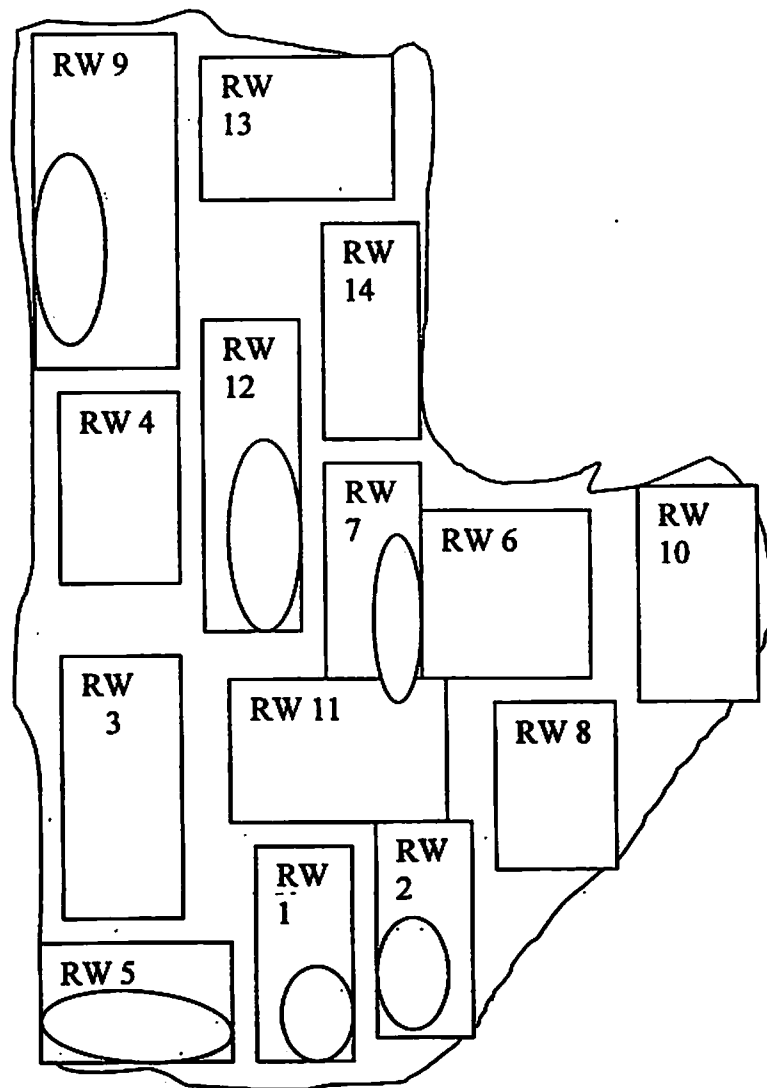
4. Kelurahan Sidotopo Wetan

Kelurahan Sidotopo Wetan memiliki jumlah penduduk mencapai 44.420 jiwa. Letak wilayah administratif sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Penggirian Kecamatan Semampir.



Dari 14 RW di kelurahan Sidotopo Wetan tersebut penduduk kaum urban berada pada di RW I, RW II, RW V, RW VII, RW IX, RW X dan RW XII. Kaum

urban tersebut mengelompok atau membuat suatu komunitas di blok / gang kecil-kecil. Jumlah komunitas kaum urban di Kelurahan Sidotopo Wetan sekitar 666 KK yang tersebar di beberapa RW / RT yaitu di RW I sebanyak 98 KK, RW II sebanyak 86 KK, RW V sebanyak 97 KK, RW VII sebanyak 105 KK, RW IX sebanyak 84 KK, RW X sebanyak 75 KK, dan RW XII sebanyak 121 KK.

Gambar 4 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Sidotopo Wetan



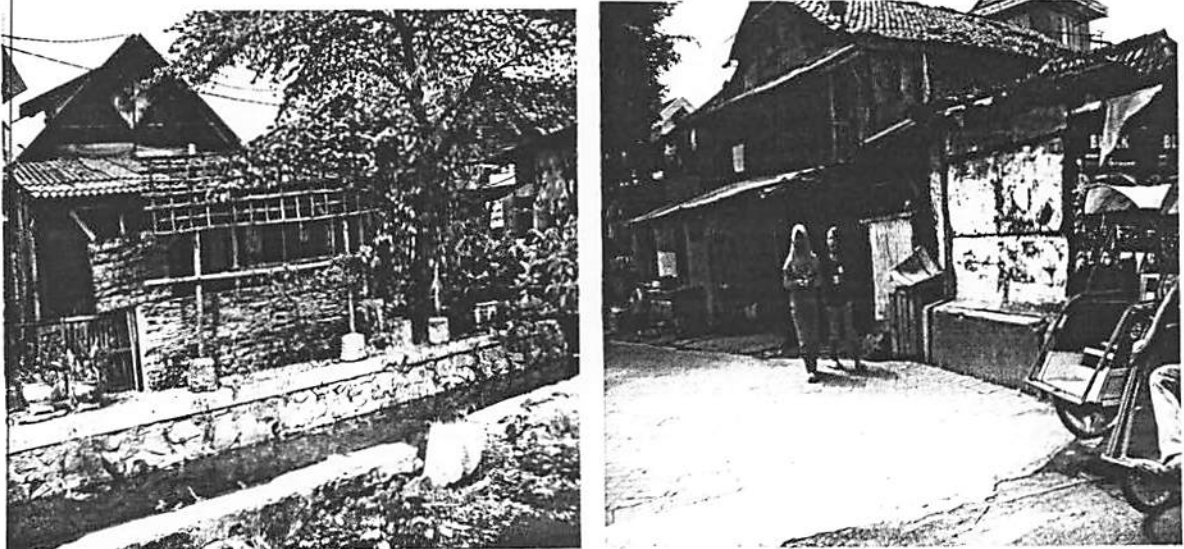
Keterangan

-  Wilayah komunitas kaum urban
-  Wilayah komunitas kelas menengah keatas

Tidak jauh berbeda dengan kelurahan lain, komunitas kaum urban di Kelurahan Sidotopo Wetan rata-rata berasal dari wilayah Madura. Kaum urban ini bertempat tinggal di Kelurahan Sidotopo Wetan sudah puluhan tahun. Mata pencaharian kaum urban di Kelurahan Sidotopo Wetan sebagian besar bekerja di sektor informal yaitu sebagai pemulung barang bekas seperti besi dan plastik. Hal ini terlihat di wilayah RW I dimana banyak penduduk sebagai pengepul barang bekas di pinggir jalan protokol Kelurahan Sidotopo Wetan. Selain itu kelompok urban ini ada yang bekerja sebagai buruh pabrik meskipun hanya sebagian kecil saja. Anak-anak para urban ini masih menikmati bangku sekolah. Sedangkan untuk kaum perempuan rata-rata dirumah karena mengurus keperluan keluarga/ anak.

Secara fisik kondisi lingkungan di komunitas kaum urban bisa dikatakan cukup baik karena sanitasi yang memadai. Namun tempat tinggal mereka yang saling berdekatan di sebuah gang kecil menyebabkan pemukiman terlihat sangat padat dan tidak teratur. Untuk aliran listrik atau air juga sudah baik sehingga kehidupan kaum urban disini sudah cukup "layak". Berikut ini gambar salah satu sudut wilayah urban di Kelurahan Sidotopo Wetan

Foto 4 : Pemukiman kumuh di kelurahan Sidotopo Wetan





Masih banyak penduduk urban yang belum memiliki identitas formal berupa KTP. Merak merupakan wilayah yang masih banyak penduduk yang belum terdaftar. Alasan klasik yang menyebabkan mereka malas mengurus identitas formal adalah karena malas mengurus surat-surat pindah.

Seperti di kelurahan lain-lain para urban di Kelurahan Sidotopo Wetan masih ada yang belum menikmati hasil dari program pemerintah, karena banyak kaum urban yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Sidotopo Wetan yang menyulitkan mereka untuk mengakses program pemerintah. Program pelatihan keterampilan (otomotif, pengolahan sampah yang baik) untuk para remaja Karang Taruna, kesehatan ataupun bantuan modal mensyaratkan peserta telah terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Sidotopo Wetan.

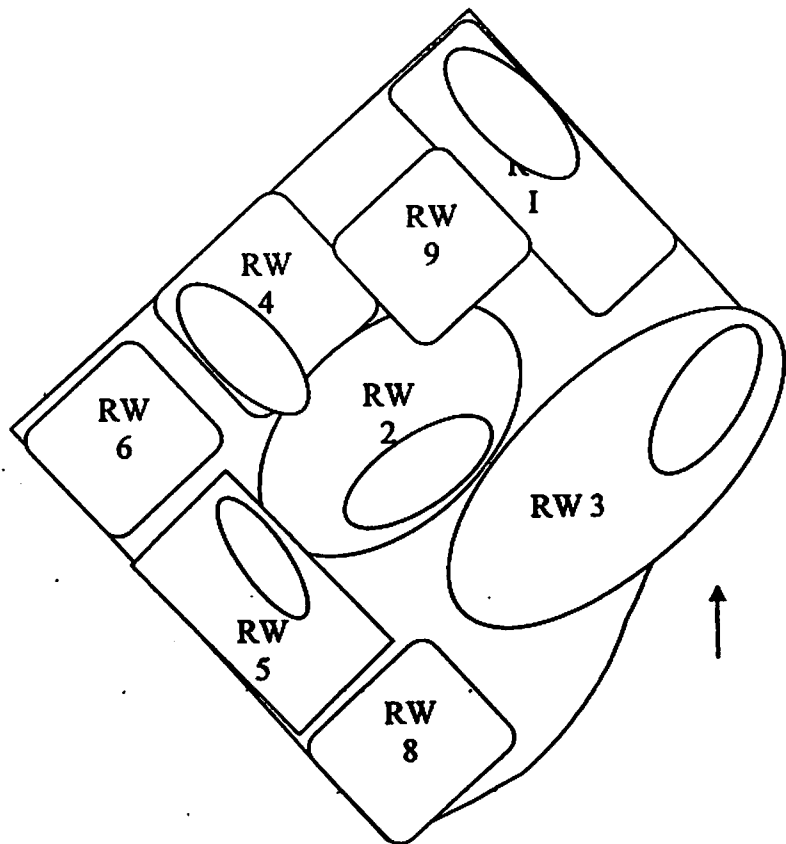
5. Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Kelurahan Tanah Kali Kedinding terletak di Kecamatan Kenjeran, wilayah yang sedikit maju di banding dari 9 dari 10 kelurahan yang dinyatakan oleh tim penyusun RTRW Kota Surabaya Tahun 2007. Di kelurahan Tanah Kali Kedinding terdapat banyak industri maju baik mikro maupun makro yang berada di dekat akses Jalan menuju Jembatan Tol Suramadu. Wilayah utara

berbatasan dengan Kelurahan Tambakwedi, sebelah selatan dengan Kelurahan Bulak, sebelah timur dengan kelurahan Bulak, sebelah barat dengan kelurahan Sidotopo Wetan. Dengan jumlah penduduk 43.576 jiwa, kelurahan Tanah Kali Kedinding terbagi dalam 9 RW. Komunitas kaum urban di kelurahan ini hanya sebagian kecil saja dari seluruh jumlah penduduk. Kaum urban hanya mengelompok di RW 4 sekitar 206 KK, RW 1 sekitar 132 KK, RW 2 sekitar 109 KK, RW 3 sekitar 82 KK, dan RW 5 sekitar 98 KK. Jadi, jika ditotal keseluruhan untuk jumlah komunitas kaum urban di Wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding berkisar sekitar 627 KK. Berikut, denah lokasi kumuh di kelurahan Kali Kedinding

Gambar 5 :

Denah pemukiman kumuh di kelurahan Tanah Kali Kedinding



keterangan



Wilayah komunitas kaum urban



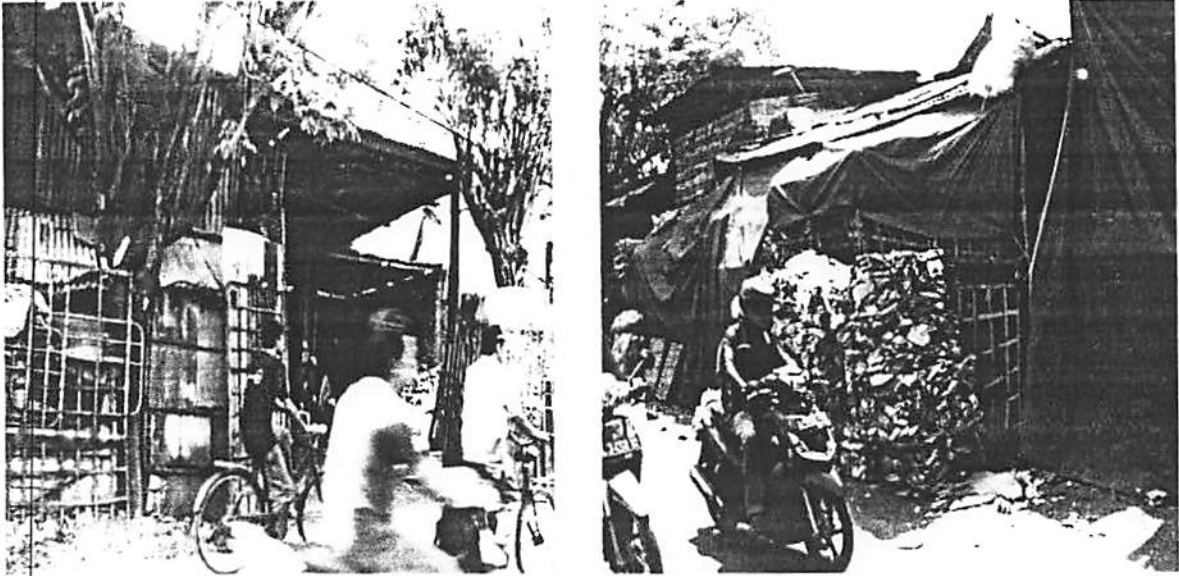
Wilayah komunitas kelas menengah keatas

Kaum urban di kelurahan ini rata-rata berasal dari komunitas kaum Madura dan tinggal di Surabaya sudah puluhan tahun lebih, sehingga sudah turun temurun. Saat ini akses ke Madura menuju Kota Surabaya khususnya Wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding lebih mudah karena adanya pembangunan Jembatan Suramadu yang berdekatan dengan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Mata pencaharian komunitas kaum urban ini sebagian besar masih tidak jelas atau harian lepas dan tidak tetap. Rata-rata usia sekolah hingga 15 tahun yaitu setingkat SLTP.

Kondisi lingkungan kaum urban ini cukup layak dengan rumah bertembok. Namun penataan yang tidak teratur akibat padatnya penduduk menyebabkan kesan kumuh. Berikut, foto pemukiman kumuh di kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Foto 5 :
Pemukiman kumuh di kelurahan Tanah Kali Kedinding.





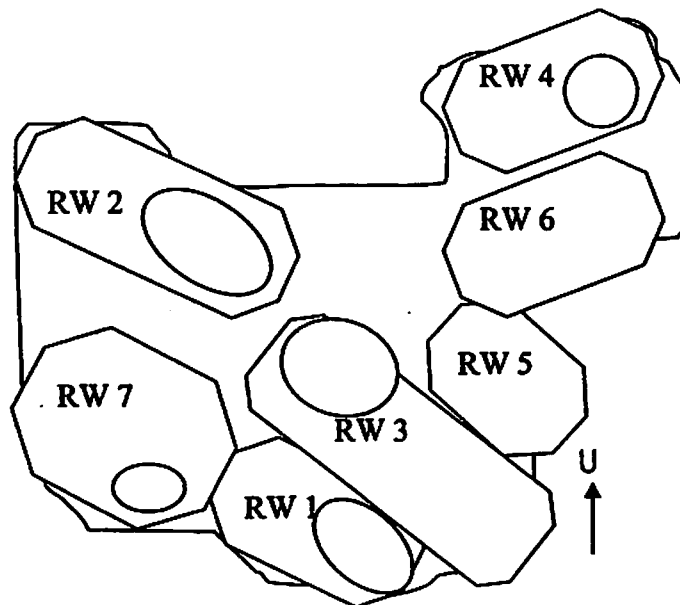
Komunitas kaum urban yang ada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagian masih ada yang belum terdaftar secara resmi. Hal ini dikarenakan tidak ada laporan dari para kaum urban untuk mengurus surat perijinan atau surat pindah baik itu untuk musiman (sementara) maupun tetap. Hal inilah yang menyebabkan pihak RT/RW hingga tingkat kelurahan tidak mempunyai data yang akurat.

Beberapa program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan di kelurahan ini, seperti program yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa program UPKm atau Unit Pembinaan Keluarga Miskin. Program konkrit untuk kaum miskin yakni program Program Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh (RSDK), program pekerjaan pembangunan kampung lewat keluarga miskin, dan program pemberian kredit modal bagi para wirausaha untuk kaum miskin yang memenuhi beberapa kriteria-kriteria. Terdapat 5 KK yang tahun 2008 direnovasi rumahnya. Sementara itu untuk program pemberantasan kemiskinan seperti Jamkesmas, pedidikan gratis, dan berbagai pelatihan yang dilaksanakan menyaratkan penduduk untuk memiliki identitas resmi berupa KTP.

6. Kelurahan Bulak

Kelurahan Bulak merupakan daerah yang terletak di kecamatan Bulak, merupakan bagian dari komunitas kaum urban. Kelurahan Bulak sendiri mempunyai batas wilayah administratif dengan sebelah utara berbatasan Wilayah Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, sebelah selatan berbatasan Wilayah Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulorejo, sebelah barat Wilayah Kelurahan Komplek Kenjeran Kecamatan Bula, dan sebelah timur Selat Madura. Dengan jumlah penduduk yang sekitar 4300 jiwa, kelurahan Bulak terbagi atas 7 RW. Pola penyebaran masyarakat kumuh atau urban terdapat di 5 RW dari 7 RW yang ada dengan jumlah sekitar 300 KK. Kelima RW tersebut yaitu RW 1 sekitar 100 KK, RW II sekitar 98 KK, RW III sekitar 50 KK, RW IV sekitar 75 KK, dan RW VII sekitar 88 KK. Kaum urban ini mengelompok dan membentuk blok-blok kecil di RW-RW tersebut yang nampak pada denah berikut :

Gambar 6 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bulak



Keterangan :

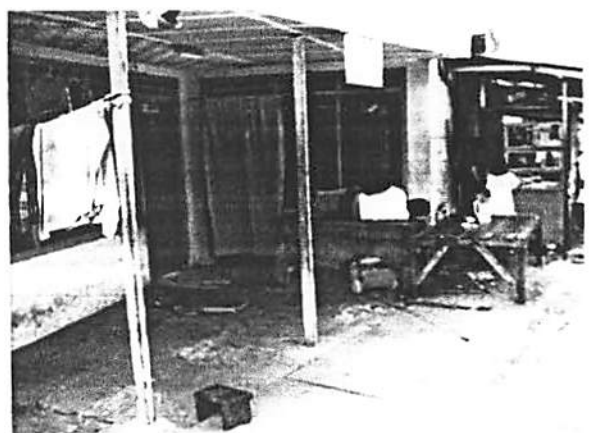
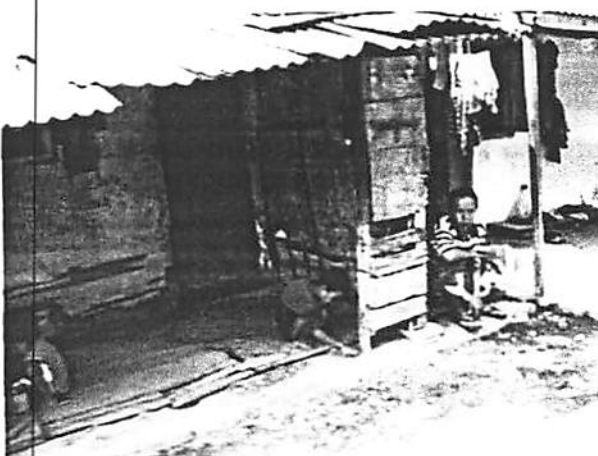
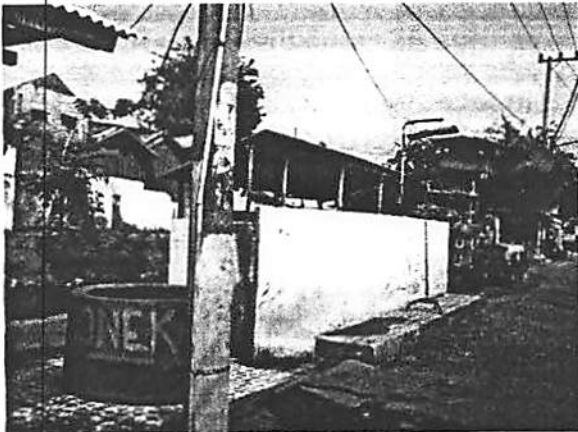
- Wilayah komunitas kaum urban
- Wilayah komunitas kelas menengah keatas

Sama dengan daerah lain, komunitas kaum urban di Kelurahan Bulak rata-rata berasal dari wilayah Madura dan bertempat tinggal di Kelurahan Bulak sudah lebih dari puluhan tahun. Mata pencaharian mereka tidak tetap dan sebagian menjadi buruh pabrik karena di Kelurahan Bulak banyak terdapat industri makro / pabrik. Anak-anak disini masih bisa menikmati bangku sekolah karena mereka masih bisa memahami pentingnya pendidikan.

Secara fisik kondisi lingkungan kaum urban sudah cukup baik karena sanitasi yang memadai. Namun seperti lingkungan urban yang lain, mereka menempati rumah yang di gang kecil yang sangat padat , tidak teratur yang memberi kesan kumuh. Berikut, foto kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bulak yang bisa dilihat di bawah ini :

Foto 6 :

Pemukiman kumuh di kelurahan Bulak



Hingga saat ini masih banyak kaum urban yang belum terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Bulak. Alasannya adalah mereka malas untuk mengurus surat pindah yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Para urban di Kelurahan Bulak masih ada yang belum menikmati hasil dari program pemerintah, karena kendala administrasi dengan tidak adanya KTP. Di Kelurahan Bulak terdapat program dari Dinas Sosial berupa Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKm), sebagai pemberdayaan bagi kaum miskin yang terdaftar saja. Demikian juga dengan program lain seperti PNPM, Raskin, dan Jamkesmas mensyaratkan penduduk legal sebagai *target group*.

7. Kelurahan Dupak

Kelurahan Dupak terletak di kecamatan Krembangan. Kelurahan Dupak berbatasan dengan kelurahan Morokrembangan disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Jepara, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Genting dan kelurahan Morokrembangan, dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Tembok Dukuh. Jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 25.396 jiwa. Kelurahan ini memiliki 5 RW, sedangkan wilayah kumuhnya terdapat di RW 4 dan RW 5.

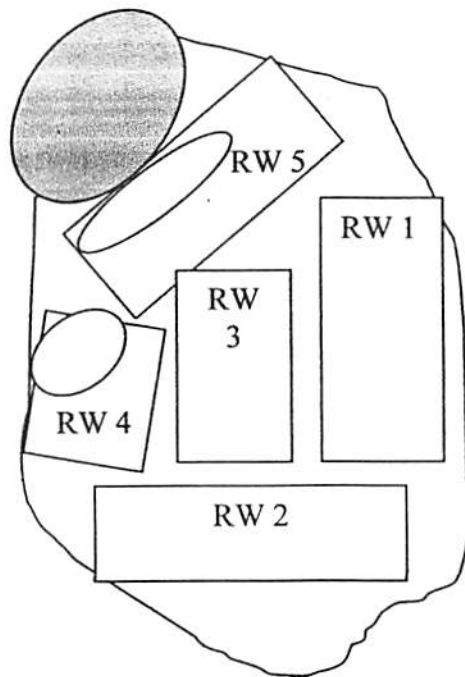
RW 4 terletak didaerah Dupak Bangunsari, yang jumlah penduduknya berkisar antara 5070 jiwa. Rata-rata para urban berasal dari Madura, Lamongan, Gresik, dan Jember yang menetap di Surabaya lebih dari 10 tahun. Di RW 4 ini terdapat lokalisasi "kelas 2" yang biasa disebut lokalisasi Bangunsari. Dilokalisasi ini terdapat kurang lebih sekitar 200 PSK. Para PSK sering mendapat pelatihan-pelatihan dari Dinsos Surabaya seperti pelatihan menjahit, memasak, salon, tata rias dan lain-lain. Harapannya ialah agar ketika mereka lepas dari dunia prostitusi, mereka dapat hidup mandiri dan dapat bertahan hidup dengan keahlian yang mereka miliki. Memang pelatihan ini cukup efektif, terbukti tiap tahun jumlah PSK di lokalisasi ini terus berkurang. Perkiraan dari salah seorang aparat kelurahan, 5-7 tahun lagi mungkin lokalisasi ini hanya tinggal sejarah saja.

Sedangkan RW 5 terletak didaerah Dupak Bangunrejo. Jumlah penduduk di RW ini berkisar 7100 orang. RW 5 ini terletak di sekitar bozem kalianak.




Seperti daerah lainnya, di RW ini mayoritas para urban berasal dari Madura dan menetap di Surabaya lebih dari 15 tahun. Berikut, denah pemukiman kumuh di kelurahan Dupak.

Gambar 7 :
Denah pemukiman kumuh di kelurahan Dupak

U



KETERANGAN :

-  Bozem kalianak
-  Wilayah kumuh
-  Wilayah pemukiman non kumuh.

Mata pencaharian para urban diwilayah ini amat beragam, ada yang bekerja disektor informal, pegawai swasta, dan kuli dipergudangan Margomulyo dan kuli ekspedisi di pelabuhan. Mayoritas anak-anak para urban telah

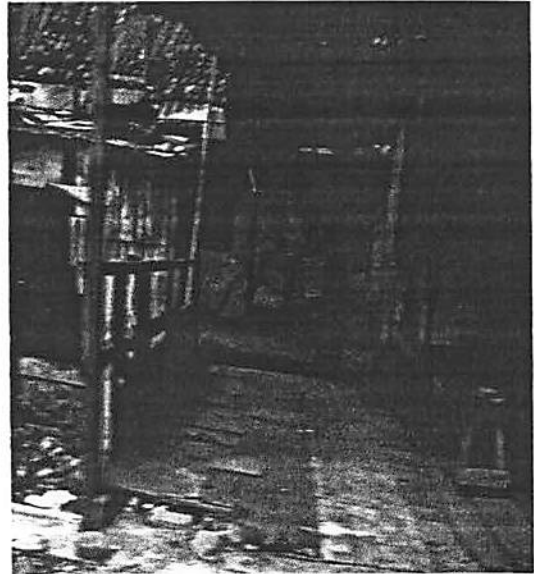
menikmati bangku sekolah karena kebijakan BOS dan BOPDA sehingga mereka dapat menikmati pendidikan secara murah, bahkan gratis.

Kondisi lingkungan di RW 4 ini cukup kumuh, dimana terdapat pemukiman padat penduduk, terdapat beberapa gubuk kumuh, tidak semua penduduk di wilayah ini menggunakan air PAM karena sebagian besar masih menggunakan air sumur, namun di wilayah ini seluruh rumah telah dialiri aliran listrik. Demikian juga kondisi lingkungan RW 5 bisa dibilang sangat kumuh. Beberapa dari mereka menetap berkelompok dipinggiran Bozem Kalianak, bahkan ada juga gubuk-gubuk kumuh yang berada dibawah kolong jalan tol Surabaya-Porong. Sanitasi masih sangat buruk dengan MCK yang tidak layak (dibuang di sungai), sebagian masih menggunakan air sumur, dan beberapa gubuk tidak dialiri aliran listrik. Berikut, foto pemukiman kumuh di kelurahan Dupak seperti dibawah ini :

Foto 7 :

Pemukiman kumuh di kelurahan Dupak





Sekitar 15% penduduk diwilayah ini tidak terdaftar resmi di Kelurahan. Kendalanya ialah mahalanya biaya untuk mengurus surat-surat tersebut, keterbatasan waktu karena membutuhkan minimal 5 hari. Karena tidak terdaftar secara resmi di Kelurahan, maka mereka tidak bisa menerima program program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang digalakkan Pemkot seperti Jamkesmas, BLT, PNPM, Raskin, dan Gakin.

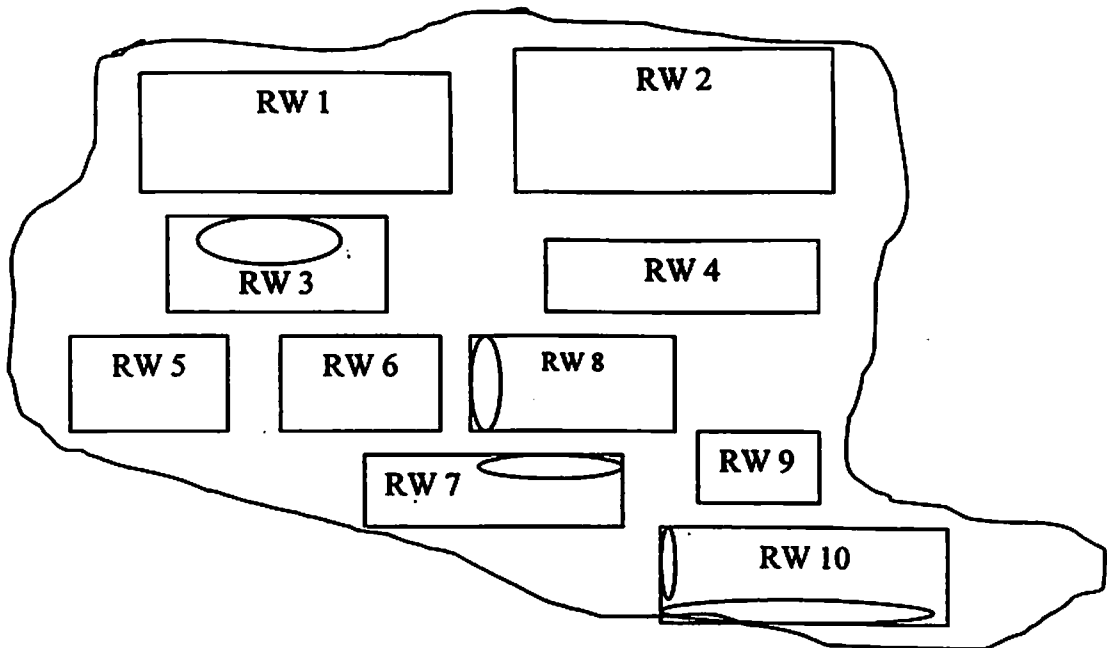
Selain itu, di RW 4 terdapat Usaha kecil menengah berupa usaha pembuatan keset dan sapu oleh beberapa kelompok masyarakat urban. Sedangkan di RW 5 juga terdapat UKM berupa pembuatan peralatan dapur dan pembuatan krupuk. Pihak kelurahan melakukan pembinaan terhadap UKM tersebut dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi melalui kordinasi dengan dinas koperasi Usaha kecil dan Menengah kota Surabaya.

8. Kelurahan Bongkaran



Kelurahan Bongkaran terletak di kecamatan Pabean Cantian. Secara geografis, kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan Nyamplungan kecamatan Pabean Cantian disebelah utara, disebelah selatan berbatasan dengan kelurahan peneleh kecamatan Genteng, sebelah timur kelurahan Kapasari kecamatan Simokerto, dan sebelah barat kelurahan krembangan selatan kecamatan krembangan. Jumlah penduduk di kelurahan Bongkaran berkisar 12682 orang dan kelurahan ini memiliki 10 RW. Dari 10 RW tersebut, lingkungan kumuh terdapat di RW 3,7,8 dan RW 10. Jumlah penduduk di RW 3 sekitar 1003 orang, RW 7 sekitar 1350 orang, RW 8 sekitar 1630 dan RW 10 sekitar 2970 orang.

Para urban ini 40% dari suku Madura, 30% WNI keturunan, dan sisanya berasal dari daerah Lamongan, Jawa Tengah, Jember, Lumajang, Ngawi dan lain-lain. Rata-rata mereka telah tinggal di Surabaya hampir 20 tahun lebih. Di kelurahan Bongkaran terdapat WNI keturunan yang berkumpul disuatu wilayah dan membentuk komunitas. Komunitas WNI keturunan ini berada didaerah Kembang Jepun, Jagalan dan Pengampon yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai daerah "pecinan".

Mata pencaharian para urban beragam, mulai bekerja disektor informal, sektor jasa, PNS, dan usaha kecil menengah. Namun mayoritas bekerja disektor jasa seperti sebagai kuli angkut dan penjaga toko karena di kelurahan Bongkaran terdapat 18 komplek pertokoan dan beberapa pusat perbelanjaan seperti daerah Kembang Jepun, Pasar Atum Mall, dan pasar Slompretan. Hal yang cukup kontradiktif terlihat manakala disatu sisi aktivitas ekonomi di kelurahan ini cukup hidup namun disisi lain terdapat banyak pemukiman kumuh. Khusus di RW 3, terdapat 67 orang pemilik industri rumah tangga dalam bentuk botol bekas, drum, dan tong sampah yang terbuat dari ban bekas. Menurut salah satu aparat kelurahan, kerajinan tong sampah dari ban bekas yang ada dikelurahan Bongkaran cukup terkenal dikalangan masyarakat Surabaya. Berikut, gambar denah pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran yang bisa dilihat dibawah ini :

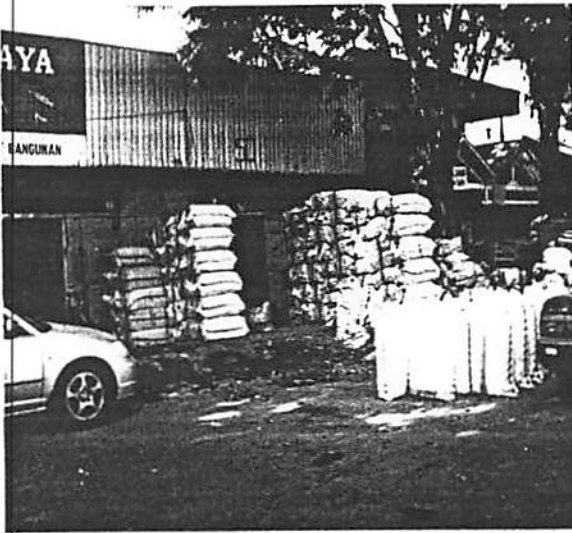
Gambar 8 : Denah pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran

Ket :

-  Wilayah pemukiman kumuh
-  Wilayah pemukiman non kumuh.

Mayoritas kondisi rumah para urban telah memiliki saluran listrik, sebagian besar memakai air PAM namun sanitasinya masih kurang layak. Kondisi kumuh ini juga terlihat di RW 3 dimana terdapat industri rumah tangga. Bahan baku untuk pembuatan industri rumah tangga banak tertumpuk di halaman rumah dan memakan sebagian badan jalan. Aparat kecamatan seringkali melakukan penertiban, namun kondisi ini tidak mengalami perubahan. Para pelaku industri rumah tangga ini sulit sekali diatur yang menurut beberapa aparat lebih dikarenakan mereka ini berasal dari suku Madura. Berikut, foto kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran.

Foto 8 : Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Bongkaran

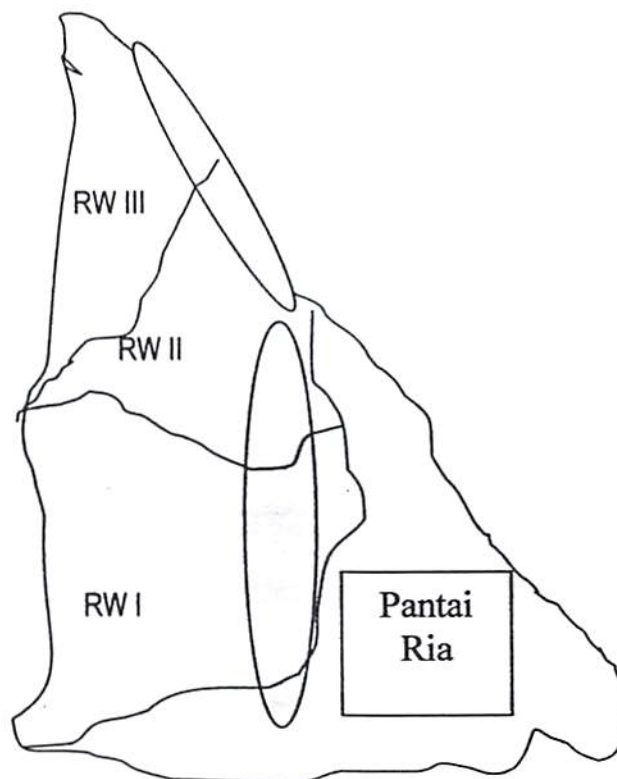


Hampir 15% kaum urban tidak terdaftar secara resmi di kelurahan. Hal ini terjadi karena para urban tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus surat-surat tersebut. Selain itu, aparat RT/RW juga kurang berinisiatif melakukan pendataan. Padahal bila para urban terdaftar secara resmi di kelurahan, mereka akan menikmati program-program dari pemerintah seperti Raskin, BLT, Jamkesmas, PNPM Mandiri dan Gardu Taskin. Para urban ini sebenarnya pernah mendapatkan pelatihan salon yang diadakan oleh Disnaker, namun hal ini kurang berhasil.

9. Kelurahan Sukolilo

Kelurahan Sukolilo merupakan daerah pesisir Pantai Kenjeran yang memiliki batas wilayah administratif sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Mulyorejo, sebelah barat berbatasan dengan Komplek Kenjeran Kecamatan Bulak, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura. Kelurahan Sukolilo memiliki jumlah penduduk 4300 Jiwa yang terdiri dari 3 RW. Lokasi para urban di kelurahan merata di RW I sebanyak 68 KK, RW II sebanyak 29 KK dan RW III sebanyak 58 KK . Berikut, adalah gambar denah pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo.

Gambar 9 :
Denah lokasi pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo



keterangan

○ Wilayah komunitas kaum urban

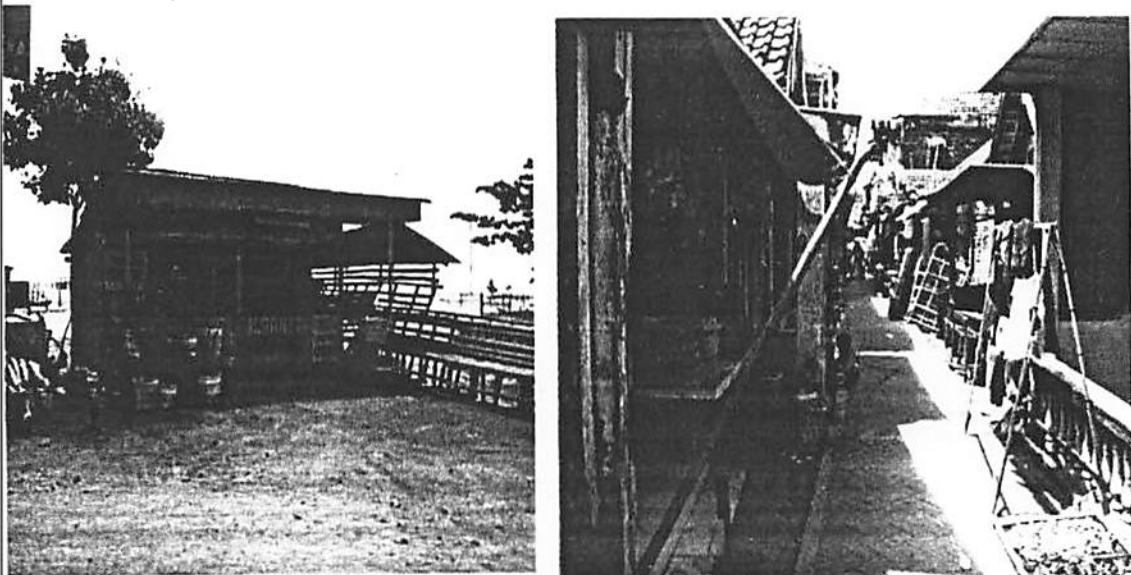
□ Wilayah komunitas kelas menengah keatas

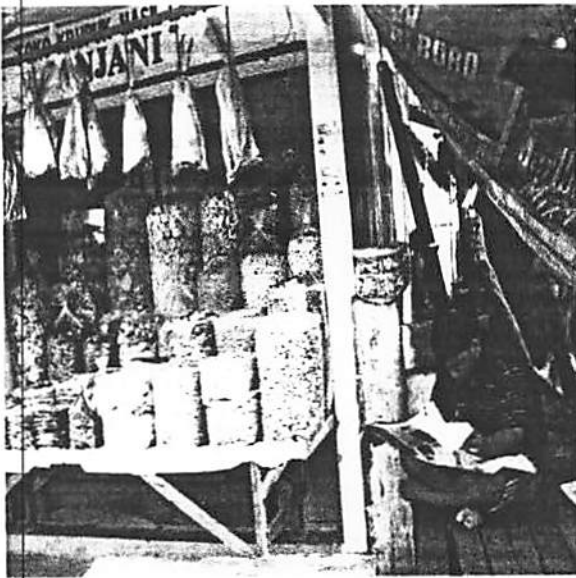
Kaum urban di Kelurahan Sukolilo ini rata-rata berasal dari Madura, hal ini karena jarak antara Kelurahan Sukolilo dan Pulau Madura yang berdekatan. Mereka menetap di Surabaya secara turun menurun sekitar 20 -30 an tahun. Para urban di kelurahan Sukolilo sudah mulai berfikir untuk mandiri dan hidup teratur dengan mencari nafkah sehari-hari sebagai nelayan dan mengolah hasil tangkapan dari laut. Tidak hanya kaum laki-laki saja yang bekerja melainkan kaum perempuan, anak-anak, dan para remaja juga ikut membantu mengolah hasil dari tangkapan laut.

Kondisi lingkungan komunitas kaum urban di Kelurahan Sokolilo rata-rata cukup layak, namun seperti di kelurahan lainnya mereka tinggal di tempat yang sangat padat sehingga terlihat sangat kumuh. Sanitasi yang masih kurang higienis karena mereka membuang sampah berupa limbah hasil laut di sekitar pantai, menimbulkan bau yang menyengat. Berikut, foto kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo.

Foto 9 :

Kondisi Pemukiman kumuh di kelurahan Sukolilo





Kaum urban ini sebagian tidak terdaftar secara resmi, dengan alasan malas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi yang memakan waktu, tenaga, dan uang. Data di pihak RW / RW juga masih minim untuk mendata jumlah pasti dari kaum urban ini. Seperti nasib para urban di kelurahan lain, untuk program kemiskinan masih belum terasa manfaatnya bagi mereka karena mensyaratkan administrasi legal untuk menjadi peserta.

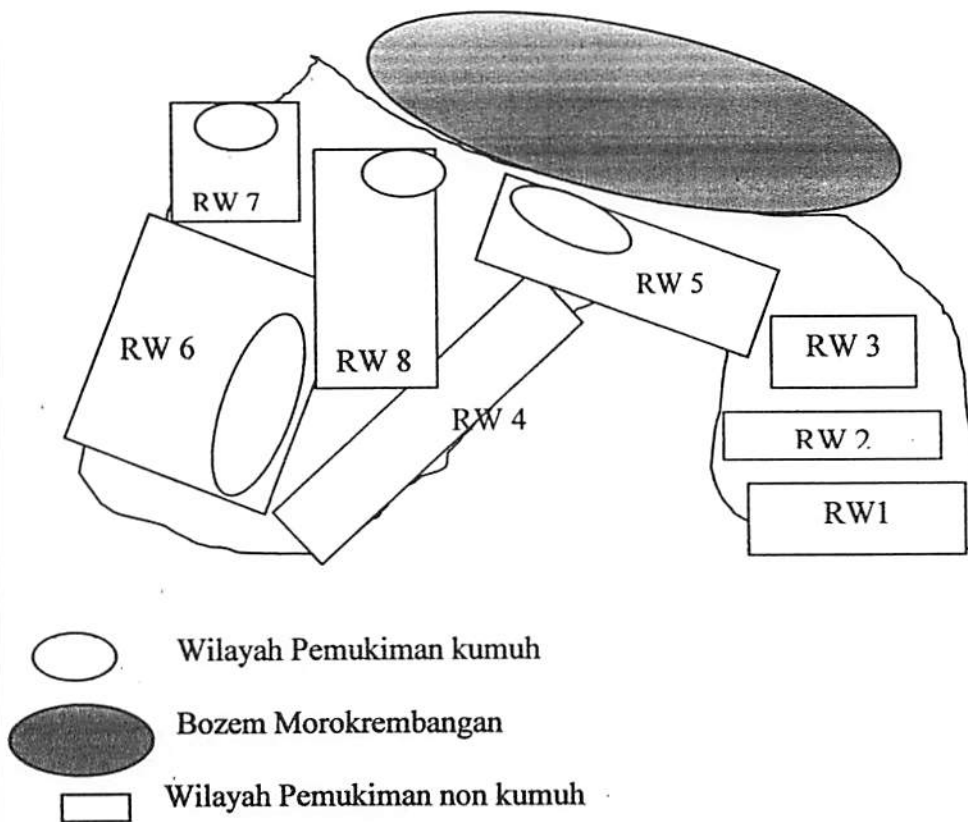
Di Kelurahan Sukolilo terdapat banyak sekali Usaha Kecil Menengah atau Mikro. Namun hanya sekitar 50 Unit saja yang mendapat perhatian dari pemerintah berupa pelatihan dari Dinas Perindustrian Kota Surabaya dan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi. Sedangkan usaha mikro lainnya terlihat masih belum tersentuh oleh program pemerintah.

10. Kelurahan Moro Krembangan.

Kelurahan Moro Krembangan terdiri dari 8 RW. Dari 8 RW tersebut, pemukiman kumuh terdapat di 4 RW yaitu RW V, VI, VII, dan VIII. Jumlah penduduk urban tersebut menyebar di RW V berjumlah 5279 orang, RW VI berjumlah 17183 orang, RW VII berjumlah 4038 orang, dan RW VIII berjumlah 2018 orang. Para urban di kelurahan tersebut mayoritas berasal dari Madura

dan Lamongan yang rata-rata telah lebih dari 15 tahun menetap di wilayah tersebut. Berikut, denah lokasi pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan seperti dibawah ini.

Gambar 10 :
Denah pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan



Di RW V, terdapat UKM dibidang sepatu, tas dan dompet. Sayangnya, UKM ini belum pernah mendapat pelatihan ataupun bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UKM.

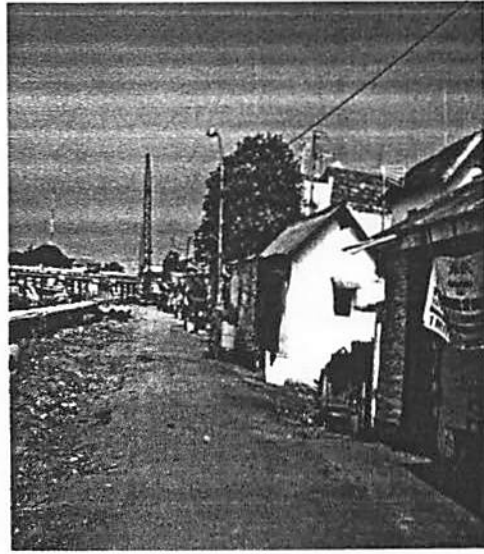
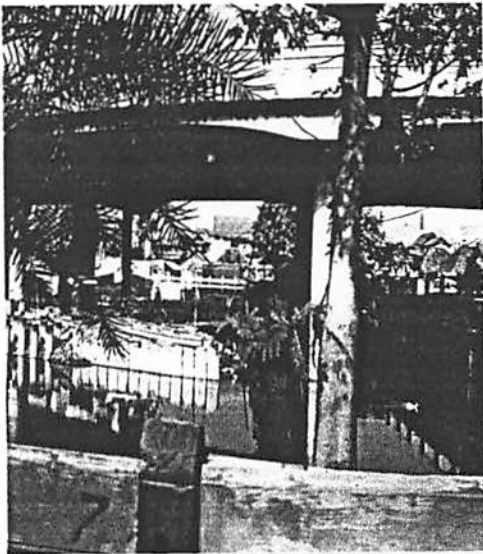
RW VI tergolong sebagai pemukiman padat penduduk dimana terdapat 44 RT. Disini juga terdapat sebuah lokalisasi "kelas 2" yang disebut lokalisasi Kremil / Tambak Asri. Menurut catatan kelurahan, jumlah PSK di Kremil berjumlah sekitar 350 orang, yang dari tahun ke tahun jumlah ini cenderung berkurang. Daerah asal para PSK pun beragam, mulai dari Lamongan, Jombang, Nganjuk, Madiun dan lain-lain. Setiap 3 bulan sekali Dinas Sosial kota Surabaya memberikan pembinaan berupa pemberian keterampilan bagi para PSK seperti memasak, menjahit, dan salon. Hal ini dimaksudkan agar para PSK dapat keluar dari "dunia hitam" dan memulai hidup baru dengan berwirausaha. Namun Dinsos hanya memberikan pelatihan keterampilan saja tanpa memberikan bantuan modal. Menurut aparat kelurahan, program yang diberikan oleh Dinsos cukup membantu dalam mengurangi jumlah PSK di Kremil.

Mata pencaharian para urban di wilayah RW VII dan RW VIII adalah bekerja di sektor swasta dan nelayan. Para nelayan ini mencari hasil di muara sungai kalianak yang langsung berdekatan dengan selat Madura. Mereka pernah mendapat pelatihan dari dinas perikanan dan kelautan Kota Surabaya dalam hal pengolahan hasil-hasil tangkapan dari laut. Ternyata program tersebut cukup berhasil dalam memberdayakan masyarakat nelayan.

Kondisi rumah kaum urban ini tergolong kumuh dengan letak rumah yang padat berdekatan satu sama lain. Sebagian masyarakat tidak menikmati air dari PDAM namun memakai air sungai dan air yang ada di Bozeem Moro Krembangan untuk keperluan sehari-hari mulai mandi dan mencuci pakaian. Berikut, foto yang menggambarkan kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan.

Foto 10 :

Kondisi pemukiman kumuh di kelurahan Moro Krembangan



Hampir 30% penduduk di kelurahan Moro Krembangan tidak terdaftar secara resmi di kelurahan. Alasan teknis menjadi penyebab para urban tidak mau mengurus KTP karena harus meluangkan waktu sekitar 5 hari untuk mengurus surat pindah di daerah asal. Di 4 wilayah RW tersebut, masyarakat pernah

mendapat program pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang umumnya juga didapatkan oleh kelurahan lain di kota Surabaya seperti Raskin, BLT, Jamkesmas, PNPM Mandiri dan Gardu Taskin. Namun seperti biasa, beberapa program tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat yang ber KTP setempat.

Tabel 1:

Profil Kawasan Kumuh di Surabaya Utara

No	Kelurahan	Lokasi	Jumlah	Asal	Pekerjaan	Kondisi Lingkungan	KTP	Program Pengentasan Kemiskinan	
								KTP	Non KTP
1	Ujung	3 RW (10,11,12) dari 12 RW	970 KK	Madura (menetap puluhan tahun)	Buruh peti kemas, rombeng, PKL,	Kumuh, rumah berdempetan dalam gang kecil dan gubuk semi permanen di sekitar sungai & rel, sebaian besar tidak memiliki MCK namun ada MCK umum,	Sekitar 25% tidak memiliki KTP.	Raskin, BLT, jamkesmas, UPPKS dan gerdu taskin	PNPM Mandiri
2	Bulak Banteng	5 RW (1,3,6,7,8) dari 8 RW	662 KK	Madura / Blok M (menetap puluhan tahun)	Kerja serabutan, rombeng, makelar, pemulung, becak, pengepul barang bekas.	Kumuh, sanitasi buruk, sebagian MCK menggunakan barak di sungai	Banyak yang tdk memiliki KTP, warga tidak melapor	Raskin, jamkesmas Kredit usaha dari Dinsos (belum pamah diakses warga)	PNPM Mandiri, pelatihan (disnaker)
3	Wonokusumo	11 RW (2,3,4,6,7,8, 10,11,14,15, 16) dari 16 Rw	2736 KK	Madura (menetap puluhan tahun)	Kuli bangunan (kerja harian lepas), becak	Kumuh, terutama di RW 4 masih tinggal di barak / gubuk. MCK menggunakan drainase sungai. Demikian juga RW VI lingkungan sangat kumuh lokasi dekat pasar wonokusumo	Sebagian tidak ber KTP karena malas mengurus surat pindah	Jamkesmas, Raskin	PNPM Mandiri, rehabilitasi rumah (dinsos) & pelatihan wirausaha namun tidak tepat sasaran
4	Sidotopo Wetan	7 RW (1,2,5,7,9,10 .12)	666 KK	Madura (menetap puluhan tahun)	Buruh pabrik, pemulung, rombeng, pengepul barang bekas	Kumuh, rumah padat penduduk di gang kecil, MCK tidak memadai. Sudah ada listrik	Sebagian tidak ber KTP,		
5	Tanah Kali Kedinding	4 RW (1,2,3,5,)	627 KK	Madura (menetap	Kerja harian lepas	Kumuh dan berdesakan namun sebagian besar	Sebagian tidak ber KTP	Jamkesmas, raskini, pendidikan	PNPM Mandiri,

		dari 9 RW		puluhan tahun)		sudah memiliki MCK		gratis. UPKM kredit modal usaha, (Program Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh / RSDK, pembangunan kampung lewat keluarga miskin,	
6	Bulak	5 RW (1,2,3,4,7) dari 7 RW	300 KK	Madura (menetap puluhan tahun)	Sebagian buruh pabrik, yang lain serabutan	Kondisi cukup layak meskipun padat. Sanitasi cukup baik karena sudah ada MCK	Sebagian tidak KTP	Jamkesmas, raskin, pendidikan gratis, Raskin, Jamkesmas, UPKM	PNPM Mandiri
7	Dupak	2 RW (4,5) dari 5 RW	565 KK	Madura, Lamongan, Gresik, Jember (menetap puluhan tahun)	Informal, buruh, jasa (kuli pergudangan & ekspedisi), terdapat lokalisasi "kelas 2" Bangunsari RW 4 : ada UKM keset & sapu RW 5 : ada UKM alat dapur & krupuk	RW 4 :Kumuh dan padat. Namun semua rumah sudah dialiri listrik. RW 5 : Kumuh, sebagian tinggal di gubug bawah kolong jalan tol. Sanitasi buruk, MCK di sungai	Sekitar 15% penduduk tidak ber KTP (malas mengurus surat pindah yang memerlukan waktu 5 hari, dan biaya administrasi mahal)	Jamkesmas, BLT, Raskin, Gakin	PNPM Mandiri
8	Bongkaran	4 RW (3,7,8,10) dari 10 RW	2970 jiwa/ 483 KK	Madura, Lamongan, Jateng, Jember, Lumajang, Ngawi (menetap puluhan tahun)	Informal, kuli angkut, penjaga toko, UKM	Kumuh, sebagian sudah dialiri listrik	Sebagian penduduk tidak ber KTP	BOS, BLT, raskin, Jamkesmas	PNPM Mandiri, Pelatihan salon (Disnaker)

9	Sukolilo	2 RW (1,2)	155 KK	Madura	Nelayan dan UKM pengolahan hasil laut	Tempat tinggal cukup layak namun padat penduduk	Sebagian tidak ber KTP	Raskin, pelatihan dari Dinas perindustrian Kota Surabaya dan di segi modal usaha mereka mendapatkan dari Dinas Koperasi Kota Surabaya	PNPM Mandiri
10	Moro Krempangan	4 RW (5,6,7,8) dari 8 RW	890 KK	Madura, lamongan (menetap sekitar 15 tahunan)	Nelayan RW 6 : terdapat lokalisasi "kelas 2" Kremi / Tambaksari	Kumuh dan padat. Sanitasi buruk, menggunakan sungai untuk keperluan mandi dan mencuci, dll	30% penduduk tidak ber KTP	BOS, BLT, raskin, Jamkesmas	PNPM Mandiri, Pelatihan

Tabel 2 :**Potensi dari Kaum Urban di Surabaya Utara**

No	Kelurahan	Potensi
1	Ujung	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas)
2	Bulak Banteng	-
3	Wonokusumo	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas)
4	Sidotopo Wetan	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas)
5	Tanah Kali Kedinding	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas)
6	Bulak	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas)
7	Dupak	-
8	Bongkaran	Pengrajin ban bekas untuk dijadikan tempat sampah dan olahan pengepul barang plastik
9	Sukolilo	Hasil olahan tangkapan ikan air laut (krupuk, kerajinan benda dari laut)
10	Moro Krembangan	Pengrajin dibidang sepatu, tas dan dompet, serta nelayan

Dari data tersebut terlihat bahwa kaum urban yang ada di Surabaya utara hidup berkelompok membentuk suatu komunitas yang khas. Mereka menempati rumah-rumah yang padat penduduk di gang-gang kecil dengan sanitasi yang buruk. Hal ini kemudian menciptakan lingkungan kumuh yang sebenarnya tidak layak ditempati. Kaum urban ini sudah bermukim di Surabaya secara turun temurun selama puluhan tahun.

Sebagian besar kaum urban bekerja di sektor informal seperti buruh, kuli, tukang becak, PKL, serabutan, pemulung, dan pengepul barang bekas. Penghasilan mereka belum dapat digunakan untuk hidup secara layak, karena hanya cukup untuk menutupi keperluan sehari-hari saja.

Hampir semua para urban berasal dari suku Madura. Sebagian besar dari mereka masih belum memiliki KTP. Alasannya adalah karena mereka malas mengurus administrasi yang memerlukan waktu, tenaga dan uang. Untuk mengurus surat pindah dari daerah asal, mereka harus meluangkan waktu sekitar 3-5 hari. Daripada mengurus administrasi lebih baik digunakan untuk bekerja mencari nafkah. Sementara itu, pihak kelurahan masih belum punya data yang valid tentang jumlah para urban ini, karena tidak ada laporan resmi dari RW / RT setempat. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing RW / RT setempat, total para urban yang tinggal di Surabaya Utara sekitar 10.541 KK yang pada kenyataannya angka ini pasti jauh lebih besar lagi.

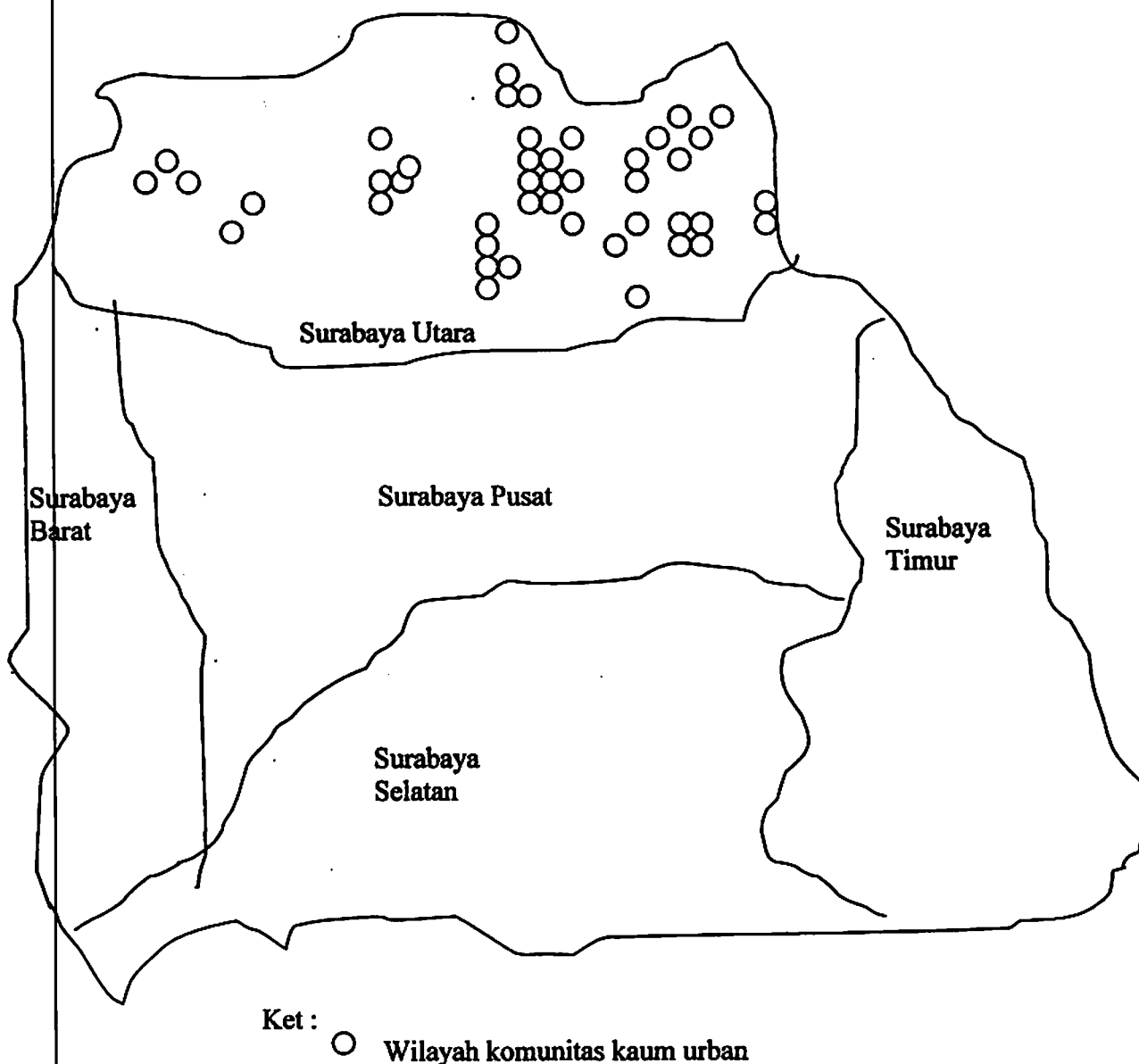
Hampir semua program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya seperti BLT, Raskin, Jamkesmas, Pelatihan dan Bantuan Kredit Modal, dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), hingga saat ini belum bisa dinikmati oleh kaum urban. Salah satu kendalanya adalah semua program pemerintah mensyaratkan kepemilikan KTP bagi peserta. Hanya program PNPM Mandiri yang bisa melibatkan mereka tanpa harus menjadi warga "resmi".

Sebenarnya para urban ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Seperti di kelurahan Ujung, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding dan Bulak terdapat pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas) untuk dijual kembali. Di kelurahan Sukolilo memiliki potensi yang bagus pula

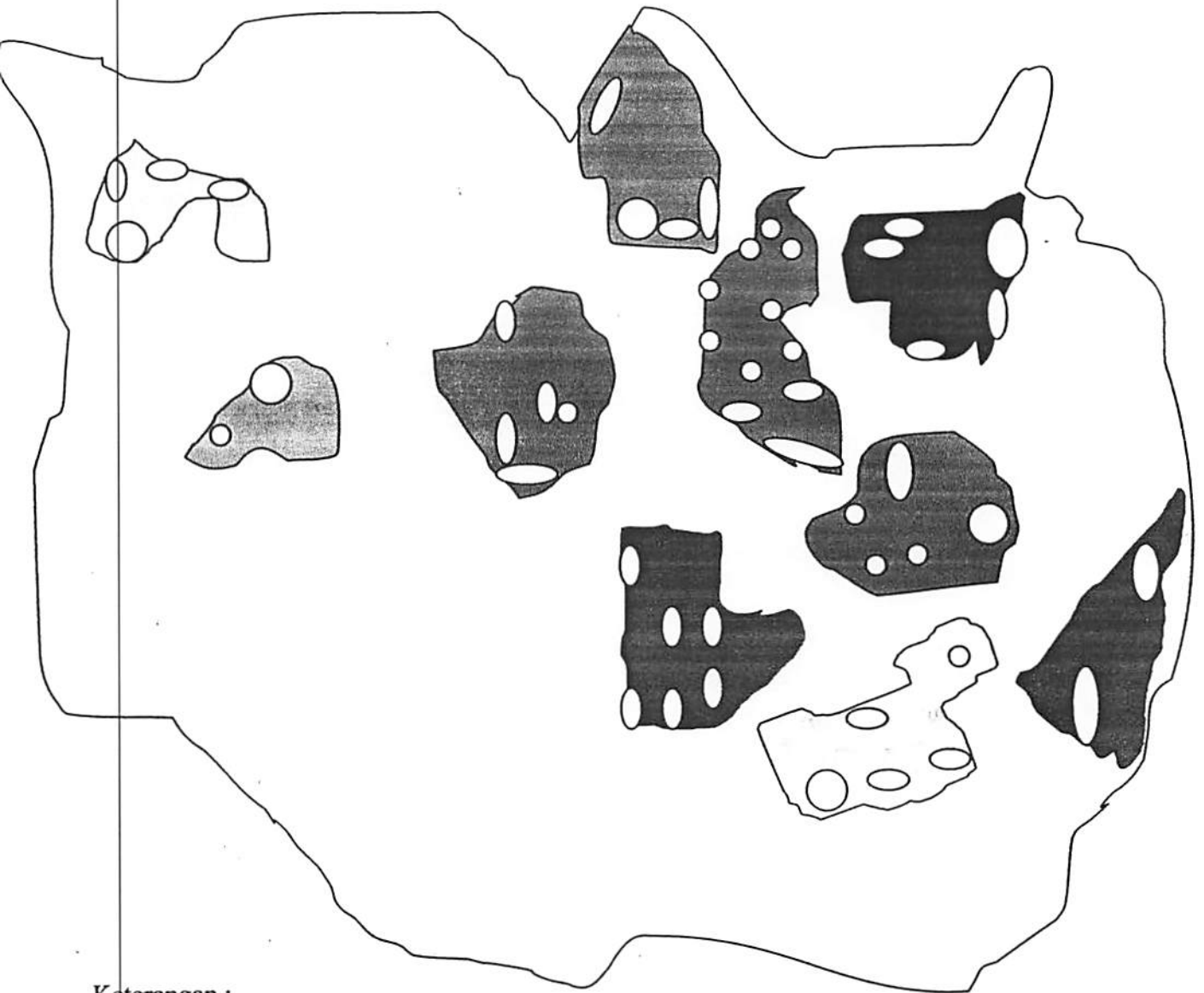
karena masyarakat sudah mulai mandiri dengan mengolah hasil laut berupa kerupuk dan kerajinan tangan. Sedangkan kelurahan Moro Krembangan memiliki potensi yang cukup bagus karena terdapat pengrajin dibidang sepatu, tas dan dompet, serta nelayan yang belum pernah ada pembinaan dari pemerintah.

V.2. Pola Penyebaran Wilayah Kumuh di Surabaya Utara

Gambar 11 : Peta Wilayah Kumuh / Urban di Surabaya



Gambar 12 : Peta Wilayah Kumuh di Surabaya Utara



Keterangan :

■ Kelurahan Sukolilo

□ Kelurahan Bulak

■ Kelurahan Tanah Kali Kedinding

■ Kelurahan Bulak Banteng

■ Kelurahan Wonokusumo

■ Kelurahan Ujung

■ Kelurahan Sidotopo Wetan

■ Kelurahan Bongkaran

□ Kelurahan Dupak

■ Kelurahan Moro Krembangan

○ Wilayah komunitas kaum urban

Dari gambar peta diatas, terlihat bahwa pemukiman kaum urban di Surabaya Utara terdapat di 10 kelurahan yaitu kelurahan Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, dan Moro Krembangan. Dari kesepuluh wilayah kelurahan tersebut penduduk urban yang paling banyak berada di kelurahan Bongkaran dengan jumlah urban sekitar 2970 KK, yang kemudian diikuti kelurahan Wonokusumo (2736 KK), Ujung (970 KK), Moro Krembangan (890 KK), Sidotopo Wetan (666 KK), Bulak banteng (662 KK), Tanah Kali Kedinding (627 KK), Bulak (300 KK), Dupak (565 KK), dan terakhir kelurahan Sukolilo (155 KK)..

V.3. Model Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surabaya

Sebelum membahas tentang model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Surabaya Utara oleh Pemkot Surabaya, terlebih dahulu akan disajikan data beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi terkait. Beberapa dinas yang berhubungan langsung dalam program pemberdayaan masyarakat ada lima yaitu : Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut, data-data yang diperoleh dari masing-masing dinas :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;

Program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada empat jenis yaitu :

- a. Program PNPM Mandiri : bertujuan untuk mengembangkan lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya dimana anggotanya dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia tanpa kampanye dan tanpa pencalonan oleh penduduk dewasa. Program ini merupakan lanjutan dari program P2KP. Sasaran program ini ialah :
 - Masyarakat (masyarakat peserta PNPM Mandiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat)
 - Pemkot/pemkab

- Para pemangku kepentingan (LSM, Ormas, perguruan tinggi, asosiasi profesi yang peduli dengan kemiskinan)
- b. **Program raskin** : bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Spesifikasi program ini ialah Pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15kg/ Rumah Tangga Sasaran/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto. Sasarannya ialah :
- Rumah tangga Sasaran berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala desa/Lurah sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh camat
 - RTM berdasarkan data hasil PKIB dan atau PSE BPS Jawa Timur, pada masing-masing desa/ kelurahan lokasi setelah dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif.
- c. **Sedangkan Gerdu Taskin** bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran , dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan TRIDAYA, yaitu : Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha, Pemberdayaan Lingkungan. Sasarannya ialah RTM berdasarkan data hasil PKIB dan atau PSE BPS Jawa Timur, pada masing-masing desa/ kelurahan lokasi setelah dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif. Program ini dikatakan cukup berhasil karena mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa:
- pengurangan beban dan peningkatan pendapatan,
 - menggerakkan usaha sektor riil,
 - mengurangi praktik rentenir melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah, cepat dan murah,
 - terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan

- terjadinya proses pembelajaran sosial (social learning),
- menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Program PNPM Mandiri, dan Gerdu Taskin, dikatakan cukup berhasil dalam pelaksanaannya. Namun untuk program Raskin, bisa dikatakan mengalami sedikit kendala, seperti misalnya soal pendataan. Banyak Warga Miskin yang tidak terdata untuk mendapatkan program raskin ini. Bapemas mengatakan bahwa program PNPM, dan Gerdu Taskin sudah cukup sesuai untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Keempat program ini tidak secara spesifik diperuntukkan bagi masyarakat pendatang (kaum urban) maupun masyarakat yang bermukim di Surabaya utara, namun secara keseluruhan bagi masyarakat miskin yang memiliki KTP Surabaya. Kecuali PNPM Mandiri yang memang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak memansang apakah dia ber KTP Surabaya atau tidak.

2. Dinas Sosial Surabaya.

Program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan Dinas sosial ada dua jenis yaitu :

A. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Program ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan program pembangunan yang berdasar pada partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada keluarga miskin setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara terpadu, mandiri dan berkelanjutan.

Tujuan program ini ialah :

- Meningkatkan kualitas lingkungan melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi social ekonomi masyarakatnya

- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

Jenis kegiatan dari program ini ialah :

1. Pengembangan usaha kecil ; yaitu kegiatan pengembangan usaha kecil dan membuka peluang/ kesempatan kerja bagi para keluarga miskin dalam rangka menambah penghasilan guna meningkatkan taraf hidupnya yang berupa pemberian pinjaman lunak untuk modal usaha. Rincian kegiatan ini ialah :
 - Keluarga miskin membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 - Setiap KUBE beranggotakan sekitar 10 gakin (yang memiliki kemauan dan kemampuan usaha)
 - Pinjaman modal stimulan dimanfaatkan secara bergulir
 - Pinjaman modal sebesar Rp 4 juta per KUBE
 - Angsuran pinjaman diberi tenggang waktu 2 bulan
 - Besar bunga pinjaman dimusyawarahkan dan disesuaikan dengan kemampuan gakin dengan lama pinjaman maksimal 2 tahun
2. Perbaikan rumah, yaitu perbaikan bangunan rumah tinggal para keluarga miskin, terutama yang kondisinya tidak layak huni ; misalnya perbaikan lantai, atap atau dinding rumah. Rincian kegiatan ini adalah :
 - Perbaikan pada rumah tidak layak huni bagi gakin
 - Dana pembangunan diberikan sebagai pinjaman bergulir (@ maksimal 3 juta/unit rumah)
 - Pengembalian dana pinjaman disesuaikan dengan kemampuan gakin dan diatur oleh UPKM

3. Perbaikan prasarana lingkungan, yaitu kegiatan untuk memperbaiki kualitas prasarana lingkungan berupa saluran kecil di lingkungan keluarga miskin. Rincian kegiatan ini adalah :

- jenis prasarana lingkungan yang dibangun berupa saluran air kecil
- lokasi saluran berda disekitar rumah / lingkungan gakin
- dana pembangunan bersifat hibah
- dupayakan adanya keswadayaan warga

4. Penguatan lembaga pengelola (UPKM), yaitu dengan memberikan pengetahuan dan latihan bagi lembaga milik warga setempat yang akan mengelola kegiatan pembinaan untuk keluarga miskin. Kelompok sasaran dari program ini ialah warga kampung dengan kategori miskin, seleksi dan penyusunan skala prioritas sasaran ditentukan berdasarkan kondisi riil gakin yang dimusyawarahkan oleh warga kampung sendiri (*stake holder* seperti LKMK, PKK, RW, tokoh masyarakat) yang difasilitasi UPKM. Gakin yang menjadi sasaran program harus merupakan penduduk setempat yang dinyatakan dengan kepemilikan KIKM, KTP, kartu kelurahan setempat dan tempat tinggalnya tidak menempati daerah terlarang misalnya stren kali, tanah negara, kolong jembatan.

Dana program RSDK pada setiap kelurahan yang digunakan untuk membiayai kegiatan perbaikan saluran, perbaikan rumah, pinjaman modal usaha serta operasional kelembagaan, akan dikelola oleh UPKM (Unit Pembinaan Keluarga Miskin). UPKM sendiri ialah lembaga lokal milik warga untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh ini.

Kawasan Surabaya Utara yang pernah menerima program ini ialah kelurahan Bulak dan Bulak Banteng pada tahun 2009 dan kelurahan Moro Krembangan pada tahun 2008. Program RSDK ini berusaha untuk mencapai kesemua kelurahan yang ada di surabaya, karena menurut Dinsos kawasan kumuh di Surabaya cukup merata. Di seluruh kelurahan di Surabaya dipastikan ada kawasan kumuhnya. Menurut Dinsos, program ini dinilai cukup berhasil

karena mayoritas peserta program RSDK ini mampu mengembalikan dana pinjaman kepada UPKM.

B. Program Pemberdayaan PSK.

Di wilayah Surabaya utara terdapat 2 lokalisasi. Lokalisasi Bangunsari terletak di kelurahan Dupak, sedangkan lokalisasi Tambak Asri terletak di wilayah krembangan. Program-program pemberdayaan PSK yang dilakukan Dinsos ialah pelatihan ketrampilan seperti menjahit, memasak, salon dan lain-lain. Tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, dinsos juga bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengadakan pengajian rutin dengan harapan akan memberikan semangat secara spritual bagi para PSK. Kelurahan dan Dinsos kini berusaha sesering mungkin memulangkan PSK baru, yang datang setelah lebaran. Terbukti, cara ini cukup efektif dalam mengurangi jumlah PSK yang ada di lokalisasi Tambak Asri/ Kremil dan Bangunsari. Kedua lokalisasi ini diprediksi akan tinggal nama saja 4 atau 5 tahun kedepan karena jumlah PSK selalu menurun dari tahun ke tahun.

3. Dinas Tenaga Kerja

Dinas tenaga kerja memiliki program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berupa (1) pelatihan kerja dan (2) penyediaan informasi lowongan kerja.

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan , produktivitas dan kesejahteraan. Pelatihan kerja ini diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Terdapat dua jenis pelatihan kerja yang ada di Disnaker Surabaya yaitu

- A. Pelatihan berbasis kompetensi ; pelatihan keahlian khusus dimana pesertanya harus berpendidikan minimal SMU. Pelatihan ini berupa lasery, listrik, mekanik, operator crane, service TV, service VCD/amplifier, otomotif, multimedia, operator dan programmer, dan

perhotelan. Syarat untuk menjadi peserta pelatihan ini ialah warga kota Surabaya (KTP/KK) yang belum bekerja, pendidikan minimal SMU/SMK atau sederajat, usia antara 18 tahun s/d 35 tahun.

- B. Pelatihan berbasis masyarakat : pelatihan ini lebih umum dan relative setiap orang bisa mengikuti. Syarat untuk mengikuti pelatihan ini cukup mudah, yaitu warga kota Surabaya dan usia maksimal 40 tahun. Yang termasuk pelatihan berbasis masyarakat ialah pelatihan Handycraft, sablon, gunting rambut, menjahit, border, perjain sepatu, perajin songkok, salon, make up dan sanggul. Pelatihan-pelatihan ini diselenggarakan di Dinas Sosial, di kelurahan-kelurahan, dan bisa juga diselenggarakan di lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta.

Program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lain yaitu informasi lowongan kerja. Selain memasang pengumuman di kantor Disnaker, pelaksanaan program ini bekerja sama dengan kelurahan untuk memberikan informasi tentang lowongan kerja kepada masyarakat.

4. Dinas Koperasi

Program Dinas koperasi terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya yaitu :

- a) Pendanaan atau penyediaan sumber dana berupa pemberian fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di seluruh Kota Surabaya.
- b) Pembinaan dan pengembangan UMKM
- c) Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM.
- d) Pengembangan akses pemasaran bagi kelompok usaha mikro
- e) Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha mikro di bidang manajemen dan teknik produksi
- f) Peningkatan standarisasi mutu dan kulaitas produk usaha mikro.

- g) Temu usaha dengan pelaku usaha skala menengah, besar dan lembaga keuangan

5. Disperindag.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya yakni :

- a) Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah yang bertujuan IKM di Kota Surabaya tangguh dan mandiri dalam produksi untuk keberlanjutan, program ini dengan kegiatannya yakni berupa pelatihan keterampilan dan sosialisasi cluster industri serta legalitas usaha.
- b) Promosi (market) produk IKM
- c) Pelaksanaan fasilitas kerjasama pengembangan industri kecil menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya melalui kemitraan usaha yakni berupa temu usaha.
- d) Pemberdayaan manajemen mutu.

Tabel 3 : Program Pemberdayaan Kemiskinan oleh Pemkot Surabaya

No	Dinas	Program Pemberdayaan	Spesifikasi Program	Target Group (syarat)	Lokasi	Hasil (Berhasil / gagal)
1	Dinas Koperasi	1. penyediaan sumber dana	Pemberian fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di seluruh Kota Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTPSurabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum 	Kelurahan Sukolilo, Tanah Kali Kedinding,	Sebagian tidak berhasil karena Keberlanjutan dalam pemberian modal atau kredit usaha, para pelaku usaha kecil menengah tidak mengembalikan dana pinjaman
		2. Pengembangan akses pemasaran bagi kelompok usaha mikro	Temu usaha dengan pelaku usaha skala menengah, besar dan lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTPSurabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum 		Terdapat adanya penyediaan stand di pusat belanja
		3. Pembinaan dan pengembangan UMKM	Pelatihan manajemen dan teknik produksi	<ul style="list-style-type: none"> a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTPSurabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum 		Cukup berhasil, karena bermanfaat bagi mereka sehingga hasil produk para pelaku usaha mikro layak untuk di pasarkan

2.	Dinas Pedagangan dan Industri	<p>4. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM</p> <p>1. Pelaksanaan fasilitas kerjasama pengembangan industri kecil menengah dan industri besar</p> <p>2. Promosi (market) produk IKM (Industri Kecil Menengah)</p>	<p>Pemantauan hasil setelah sosialisasi dengan sistem periodik 3 bulanan</p> <p>Kemitraan usaha yakni berupa temu usaha dalam lingkup besar</p> <p>Pameran dalam skala kecil dan besar di daerah-daerah</p>	<p>a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTP Surabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum</p> <p>a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTP Surabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum</p> <p>a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTP Surabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum</p>	<p>Kelurahan Sukolilo, Tanah Kali Kedinding</p> <p>Kelurahan sukolilo, Tanah Kali Kedinding</p> <p>Kelurahan Sukolilo, Tanah Kali Kedinding</p>	<p>Cukup berhasil karena dapat mengontrol UKM yang ke eksisan para UMKM sehingga mengetahui para unit UMKM yang beralih usaha</p> <p>Implementasi dalam temu usaha di forum pelaksanaan fasilitas kemitraan sebagian tidak konsisiten dalam keberlanjutannya seperti para pelaku usaha kecil menengah di persulit dalam melakukan atau masuk di industri tingkat besar,</p> <p>kurangnya keikutsertakan promosi (pameran) produk unggulan ke daerah-daerah lain seperti pada di</p>

						<p>Kelurahan Tanah Kali Kedinding UMKM pruduk pembuatan sepatu, segi berhasilnya dapat di marketkan ke PT Carrefour yang terdekat (dalam kota) hal ini hanya terlihat di keurahan sukolilo</p>
		3. Pemberdayaan manajemen mutu	<p>Pelatihan keterampilan dan sosialisasi cluster industri serta legalitas usaha</p>	<p>a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTPSurabaya) c) Kelompok UMKM yang mempunyai badan hukum</p>	<p>Kelurahan Sukolilo, Tanah Kali Kedinding</p>	<p>Kurangnya perkembangan dalam bersosialisasi dengan antar pelaku usaha kecil menengah setelah ada pelatihan,</p>
3	Dinas Sosial	1. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) • Pinjaman modal sebesar 4 juta per KUBE • Perbaiki rumah tidak layak huni bagi gakin dengan 	<p>a) Warga kampung dengan kategori miskin b) Penduduk resmi (harus memiliki KTP, KIKM) c) Tidak menempati lokasi terlarang (seperti stren kali, tanah negara, kolong jembatan,dll)</p>	<p>Kelurahan Bulak, Bulak Banteng, Morokrengan, Tanah Kali Kedinding</p>	<p>Cukup berhasil, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas peserta program RSDK mampu mengembalikan dana pinjaman kepada UPKM.

			<p>bantuan dana bergulir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan prasarana lingkungan • Penguatan lembaga pengelola (UPKM) lewat pelatihan 			
		2. Program Pemberdayaan dan penanggulangan PSK	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan ketrampilan seperti salon, memasak, menjahit • Pengajian rutin • Pendataan PSK secara rutin dan berkala 	PSK yang berada di lokasi Kremil dan Bangunsari	Lokalisasi Tambak Asri/ Kremil dan Bangunsari.	<p>Cukup berhasil, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PSK di dua lokalisasi tersebut berkurang dari tahun ke tahun.
4	Dinas Tenaga Kerja	<p>1. Program pelatihan kerja</p> <p>2. penyediaan informasi lowongan kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan berbasis kompetensi • Pelatihan berbasis masyarakat • Penyediaan informasi terkait dengan adanya 	<p>a) Masyarakat luas yang tidak memiliki keahlian</p> <p>b) Angkatan kerja yang belum bekerja</p> <p>c) warga kota Surabaya (KTP/KK) yang belum bekerja,</p> <p>d) usia maksimal 40 tahun</p> <p>e) pendidikan minimal SMU/SMK atau sederajat</p>	Seluruh kelurahan	<p>Cukup berhasil, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyerap angkatan kerja produktif yang belum bekerja • Mampu memberikan ketrampilan bagi masyarakat

5	Bappemas	<p>1. PNPM Mandiri</p> <p>2. Raskin</p>	<p>lowongan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya dimana anggotanya dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia tanpa kampanye dan tanpa pencalonan oleh penduduk dewasa. • Pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15kg/Rumah Tangga Sasaran/bulan selama 12 bulan 	<p>a) Masyarakat (masyarakat peserta PNPM Mandiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat)</p> <p>b) Pemkot/pemkab</p> <p>c) Para pemangku kepentingan (LSM, Ormas, perguruan tinggi, asosiasi profesi yang peduli dengan kemiskinan)</p> <p>a) Rumah tangga Sasaran berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh kepala desa/Lurah sebagai hasil musyawarah desa/kelurahan dan disahkan oleh camat</p> <p>b) RTM berdasarkan data hasil PKIB dan atau</p>	<p>Seluruh Kecamatan di kota Surabaya (termasuk 10 kelurahan di Surabaya Utara)</p> <p>Seluruh Kecamatan di kota Surabaya (termasuk 10 kelurahan di Surabaya Utara)</p>	<p>sehingga masyarakat yang tidak bekerja mampu membuka usaha sendiri</p> <p>Cukup berhasil, di 10 kelurahan di Surabaya Utara seluruhnya telah terbentuk BKM, dan BKM tersebut berjalan dengan baik.</p> <p>Cukup berhasil dalam mengurangi beban rumah tangga miskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok,</p>
---	----------	---	---	--	---	---

			<p>dengan harga tobus Rp. 1.600 per kg netto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 	<p>PSE BPS Jawa Timur, pada masing-masing desa/ kelurahan lokasi setelah dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif.</p>		<p>namun mengalami kendala dalam hal pendataan.</p>
		<p>3. Gerdu Taskin (Gerakan Dukung Pengentasan kemiskinan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mewujudkan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan TRIDAYA, yaitu 	<p>RTM berdasarkan data hasil PKIB dan atau PSE BPS Jawa Timur, pada masing-masing desa/ kelurahan lokasi setelah dilaksanakan klarifikasi secara partisipatif.</p>	<p>Kelurahan ujung</p>	<p>Cukup berhasil, karena mampu memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin berupa: (i) pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, (ii) menggerakkan usaha sektor riil, (iii) mengurangi praktik rentenir melalui penyediaan lembaga keuangan mikro yang melayani pinjaman modal secara mudah,</p>

						<p>cepat dan murah, (iv) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan (v) terjadinya proses pembelajaran sosial (social learning), dan (vi) menumbuhkan suasana kegairahan praktik demokrasi dalam pengambilan keputusan pembangunan.</p>
			<p>Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha, Pemberdayaan Lingkungan</p>			

Sumber : Diolah dari hasil wawancara & data sekunder

Tabel 4 : Perhatian Pemkot Terhadap Kaum Urban di Surabaya Utara

No	Dinas	Program Khusus Untuk Kaum Urban di Sby	Keterangan
1	Dinas Koperasi	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi kelompok miskin (asli warga Surabaya) saja masih susah, apalagi kalau harus ditambah urban • Bila kaum urban ini diberi program / fasilitas khusus maka dikhawatirkan akan semakin banyak urban yang masuk ke Surabaya • Program semua diratakan (tergantung Inovasi dan inisiatif masing-masing individu)
2.	Dinas Pedagangan dan Industri	Ada (namun tidak serius dan hanya kebetulan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan terhadap UKM, sedangkan program lain diberlakukan secara umum tidak ada kekhususan untuk daerah urban
3	Dinas Sosial	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi kelompok miskin (asli warga Surabaya) saja masih susah, apalagi kalau harus ditambah urban • Bila kaum urban ini diberi program / fasilitas maka dikhawatirkan akan semakin banyak urban yang masuk ke Surabaya
4	Disnaker	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Bila kaum urban ini diberi program / fasilitas maka dikhawatirkan akan semakin banyak urban yang masuk ke Surabaya • Diutamakan program pemberdayaan masyarakat ini untuk warga Surabaya, karena program ini didanai oleh APBD Surabaya
5	Bappemas	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya anggaran dari pemkot untuk membuat program bagi kaum urban ataupun pendatang. Alasannya hampir sama dengan instansi yang lain.

Sumber : Diolah dari hasil wawancara & data sekunder

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata semua program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Disperindag, dan Dinas Ketenagakerjaan ternyata masih belum ada program khusus yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan para urban di Surabaya Utara. Semua program tersebut digunakan secara umum / serentak untuk pengentasan kemiskinan di kota Surabaya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada perhatian khusus terhadap para urban.

Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah kota Surabaya terhadap kaum urban ini karena (1) tidak adanya anggaran khusus, (2) kekhawatiran akan semakin banyak terjadi urbanisasi bila para urban diberi fasilitas dan program khusus, (3) instansi terkait masih mengutamakan pemberantasan kemiskinan untuk kelompok miskin warga Surabaya asli.

Model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Surabaya dilakukan untuk mengatasi kemiskinan secara umum (general) tanpa ada program khusus bagi masyarakat urban. Program ini bahkan tidak bisa menyentuh para urban karena terkendala masalah administratif yang mensyaratkan *target group* harus merupakan warga Surabaya resmi yang ditunjukkan dengan kepemilikan KTP / KK. Selain itu, program pemberdayaan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik para urban yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat miskin lainnya.

V.4. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang melekat pada para urban di Surabaya Utara diperlukan suatu strategi khusus berupa pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan potensi para urban. Pemerintah yang selama ini terkesan tidak menghiraukan masalah kemiskinan di Surabaya Utara harus mulai memikirkan bagaimana mengentaskan mereka dari kemiskinan, karena sebenarnya bila dikelola dengan benar para urban ini akan bisa menjadi *asset* yang berharga dan bisa berperan aktif dalam proses pembangunan.

Model pemberdayaan yang bisa dikembangkan adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada pada mereka. Dalam melaksanakan program pemberdayaan haruslah berdasar pada *community development* dimana program diperuntukkan bagi kelompok-kelompok masyarakat agar hasil yang didapat lebih efektif dan efisien. Model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Surabaya Utara yang bisa dilakukan adalah :

1. Kelurahan Ujung, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, dan Bongkaran : Potensi yang dimiliki oleh keenam kelurahan ini adalah sudah adanya pengepul barang bekas berupa besi, plastik, dan kertas yang kemudian dijual kembali. Bahkan di kelurahan Bongkaran terdapat pengrajin ban bekas yang diolah menjadi tempat sampah. Dinas koperasi, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker bisa melakukan pembinaan berupa pelatihan dan peminjaman modal. Barang-barang berupa besi, plastik, dan kertas bisa ditingkatkan nilai gunanya, misalnya besi bisa digunakan untuk bahan pembuatan pagar, meja kursi, dan lain-lain. Demikian juga dengan plastik, kertas, dan ban bekas yang bisa dijadikan lebih bermanfaat dan bernilai. Kegiatan produksi ini bila dikelola dengan serius akan bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk program padat karya bisa dilakukan dengan perbaikan lingkungan dan sanitasi misalnya dengan mengembalikan fungsi sungai dan pembuatan tempat MCK yang memadai. Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa *entrepreneurship* juga perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha.
2. Kelurahan Sukolilo : Potensi yang dimiliki oleh kelurahan ini yaitu berupa olahan hasil laut berupa kerupuk dan kerajinan tangan). Potensi lain yang perlu diperhatikan yaitu warga sudah memiliki jiwa mandiri untuk mengembangkan usaha. Dinas koperasi, Disperindag, Bapemas dan Disnaker bisa melakukan pembinaan berupa pelatihan dan peminjaman modal. Selain itu, perlu pula dilakukan program padat karya berupa

perbaikan lingkungan dan sanitasi. Tempat pembuangan sampah laut perlu ditata kembali agar lingkungan tidak tercemar.

3. Kelurahan Moro Krembangan : Potensi yang dimiliki oleh kelurahan ini adalah adanya UKM sepatu, tas, dan dompet, serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dinas koperasi, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker bisa melakukan pembinaan berupa pelatihan dan peminjaman modal terhadap UKM. Selain itu, masyarakat nelayan juga perlu diberi pembinaan dan pinjaman modal untuk memanfaatkan peralatan (perahu dan jarring) yang lebih memadai untuk menangkap hasil laut. Kemudian para nelayan ini bisa dilatih untuk mengolah hasil laut untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.
4. Kelurahan Bulak Banteng : Meskipun dari hasil data di lapangan dan observasi di wilayah Bulak Banteng tidak memiliki potensi yang baik, bukan berarti wilayah ini tidak bisa dilaksanakan proses pemberdayaan. Sebagian besar penduduk yang bekerja sebagai kuli, tukang becak dan serabutan bisa diberi program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi. Sementara itu, masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul barang bekas, rombeng, dan makelar bisa diberi pelatihan wirausaha dan pinjaman bantuan modal usaha.
5. Kelurahan Dupak : Sama dengan Bulak Banteng, meskipun tidak memiliki potensi yang baik, namun program pemberdayaan masih tetap bisa dilaksanakan di kelurahan ini. Salah satunya adalah program padat karya dengan perbaikan lingkungan dan sanitasi. Sementara itu, keberadaan Bozem kalianak bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan yang bila dikerjakan dengan serius akan menghasilkan kesejahteraan bagi warga.

Sebagai langkah awal dari program pemberdayaan tersebut, perlu dilakukan penertiban administrasi berupa pendataan kaum urban. Pemerintah setempat mulai dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan harus memberikan kemudahan dan memfasilitasi kaum urban untuk mengurus KTP.

Tabel 5:

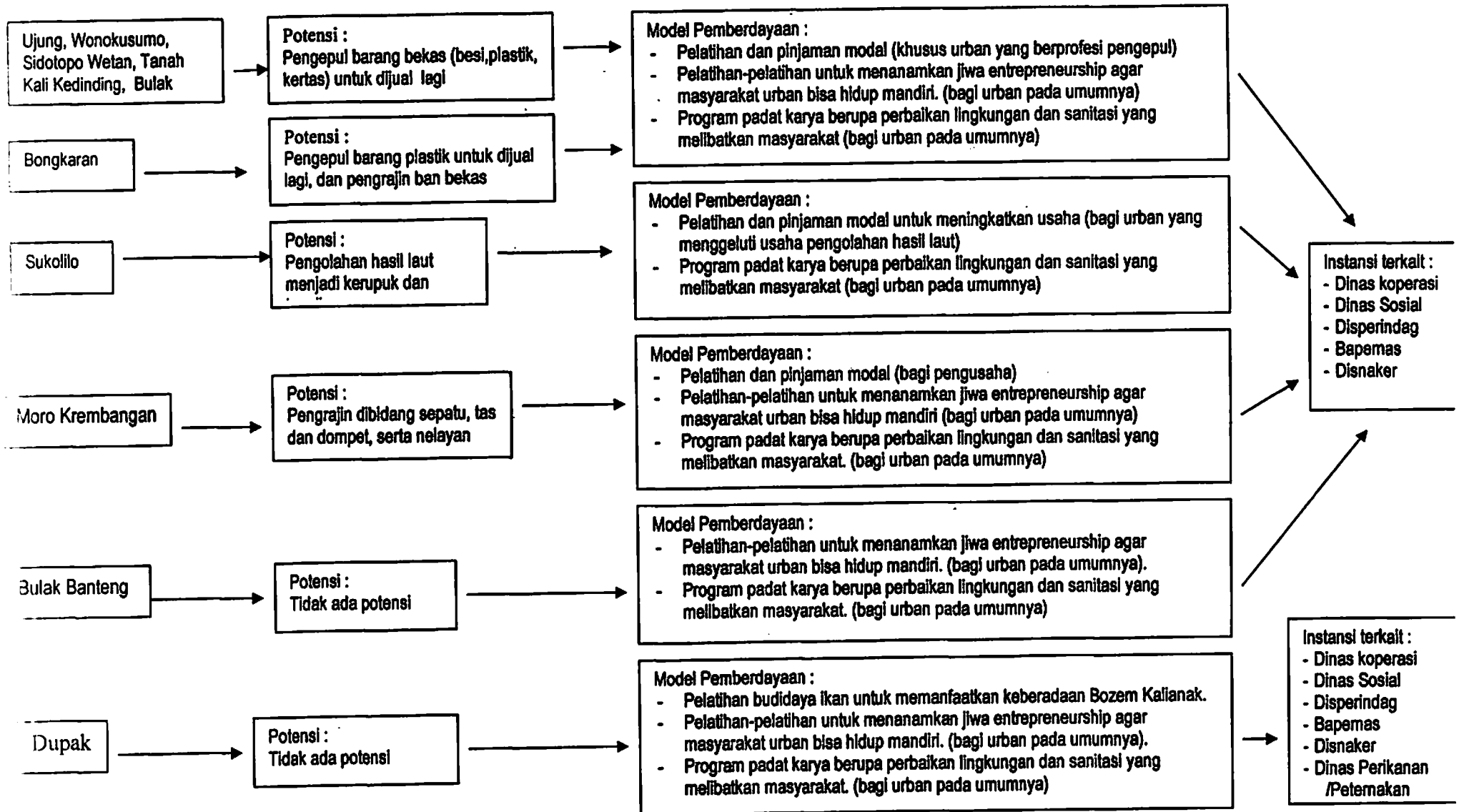
Model Pemberdayaan Bagi Para Urban di Surabaya Utara

No	Kelurahan	Potensi	Model Pemberdayaan	Instansi yang terlibat
1	Ujung, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak	Pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas) untuk dijual lagi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pinjaman modal untuk meningkatkan nilai guna barang bekas (khusus bagi urban yang berprofesi sebagai pengepul) - Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha. (bagi urban pada umumnya) - Program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat (bagi urban pada umumnya) 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker
2	Bongkaran	Pengepul barang plastik dan pengrajin ban bekas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pinjaman modal untuk meningkatkan nilai guna barang bekas (khusus bagi urban yang berprofesi sebagai pengepul dan pengrajin ban bekas) - Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha. (bagi urban pada umumnya) - Program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat. (bagi urban pada umumnya) 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker
3	Sukolilo	Pengolahan hasil laut menjadi kerupuk dan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pinjaman modal untuk meningkatkan usaha (bagi urban yang menggeluti usaha pengolahan hasil laut) - Program padat karya berupa perbaikan 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker

			lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat (bagi urban pada umumnya)	
4	Moro Krembangan	Pengrajin dibidang sepatu, tas dan dompet, serta nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pinjaman modal - Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha. (bagi urban pada umumnya) - Program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat. (bagi urban pada umumnya) 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker
5	Bulak Banteng		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha. (bagi urban pada umumnya). - Program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat. (bagi urban pada umumnya) 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Disperindag, Bapemas, dan Disnaker
6	Dupak		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan budidaya ikan untuk memanfaatkan keberadaan Bozem Kalianak. - Pelatihan-pelatihan untuk menanamkan jiwa entrepreneurship perlu dilakukan seperti pelatihan otomotif, bengkel, salon, menjahit, dan lain-lain agar masyarakat urban bisa hidup mandiri dengan berwirausaha. (bagi urban pada umumnya). - Program padat karya berupa perbaikan lingkungan dan sanitasi yang melibatkan masyarakat. (bagi urban pada umumnya) 	Dinas koperasi, Dinas Sosial, Dinas Peternakan /Perikanan, Bapemas, dan Disnaker

Sumber : Diolah dari hasil penelitian

Bagan 2 : Desain Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu :

1. Di Surabaya Utara terdapat 10 kelurahan yang masuk dalam kategori miskin karena disebabkan membanjirnya urbanisasi. Kesepuluh kelurahan tersebut yaitu kelurahan Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding, Bulak, Dupak, Bongkaran, Sukolilo, dan Moro Krembangan . Para urban ini tersebar di 47 RW, dengan total jumlah sekitar 10.541 KK.
2. Kaum urban ini membentuk komunitas / pemukiman kumuh berupa rumah padat penduduk di gang-gang kecil. Pemukiman kumuh ini ditandai dengan buruknya sanitasi berupa MCK yang tidak memadai, sampah yang dibuang sembarangan di sungai / tepi laut, air yang tidak higienis, dan rumah yang pengap karena tidak ada aliran udara bebas.
3. Hampir semua para urban ini berasal dari suku Madura dan mereka telah tinggal di Surabaya selama puluhan tahun.
4. Sebagian besar dari urban ini tidak memiliki KTP / KK karena belum terdaftar secara resmi di kelurahan. Hal inilah yang menyebabkan pihak kelurahan tidak memiliki data yang akurat mengenai jumlah para urban tersebut. Bahkan pihak RT / RW juga tidak memilikinya.
5. Sebagian besar mata pencaharian para urban ini di sektor informal seperti kuli, tukang becak, buruh lepas, PKL, pemulung, rombeng, dan pengepul barang bekas. Namun ada juga yang berwirausaha dengan membuka UKM, nelayan, dan sekaligus usaha budidaya hasil laut.

6. Potensi-potensi yang dimiliki para urban adalah : (a) Pengusaha pengepul barang bekas (besi, plastik, kertas) terdapat di kelurahan Ujung, Wonokusumo, Sidotopo Wetan, Tanah Kali Kedinding dan Bulak, (b) Pengrajin ban bekas terletak di kelurahan Bongkaran, (c) kemandirian para urban dengan mengolah hasil laut berupa kerupuk dan kerajinan terdapat di kelurahan Sukolilo, (d) pengrajin dibidang sepatu, tas dan dompet, serta nelayan terletak di kelurahan Moro Krembangan
7. Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemkot Surabaya seperti BLT, Raskin, Jamkesmas, Pelatihan dan Bantuan Kredit Modal, dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK), hingga saat ini belum bisa dinikmati oleh kaum urban. Hal ini dikarenakan semua program tersebut diperuntukkan bagi warga Surabaya yang "resmi" / ber KTP.
8. Terdapat lima instansi yang melakukan program pemberdayaan masyarakat yaitu Bapemas, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Disperindag, dan Disnaker.
9. Hingga saat ini masih belum ada program pemberdayaan yang khusus diperuntukkan bagi para urban di Surabaya Utara.
10. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah kota Surabaya terhadap kaum urban ini karena (a) tidak adanya anggaran khusus, (b) kekhawatiran akan semakin banyak terjadi urbanisasi bila para urban diberi fasilitas dan program khusus, (c) instansi terkait masih mengutamakan pemberantasan kemiskinan untuk kelompok miskin warga Surabaya asli.
11. Untuk mengatasi kemiskinan di Surabaya Utara yang disebabkan karena membanjirnya urbanisasi, diperlukan suatu bentuk pemberdayaan yang khusus sesuai dengan potensi dan karakteristik mereka. Model Pemberdayaan tersebut berupa pelatihan dan pinjaman modal, pelatihan wirausaha, dan program padat karya.

VI.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang bisa diberikan yaitu :

- 1. Upaya penanggulangan kemiskinan di Surabaya utara diperlukan keseriusan dari instansi terkait serta kerjasama yang baik dengan para *stakeholders*.**
- 2. Pihak kelurahan beserta RT dan RW setempat harus berinisiatif untuk melakukan pendataan para urban dan memberi fasilitas / kemudahan untuk mengurus administrasi. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang akurat tentang keberadaan urban dan pemberian identitas resmi.**

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc
- Birtarto, R, Prof, 1993, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Galia Indonesia.
- Kartasamita, 1996, *Pemberdayaan : Pembangunan Berwajah Manusia*, Raja Grafindo Persada
- Khudori, Darwis, 1995, *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta, PPSK
- Lewis, Oscar 2004 "Kebudayaan Kemiskinan", dalam *Kemiskinan di Perkotaan* (di-edit oleh Parsudi Suparlan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan.
- Lipton, Michael ,1977 , *Urbanitation in the Modern World*, London: Faber and Faber.
- Miles, Matthew B dan Michael A. Huberman, 1992., *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta-Ui Press.
- Prawirakusuma, Soeharto, 2001, *Ekonomi Rakyat*, University Gadjah Mada Press
- Proserpina, D, 2003, *Empowemment & Development*, University of the Philippines Press
- Sudjatmoko, 2003, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Internet :
www.wikipedia.com (diakses tgl 15 Nov 2008)
www.kemiskinankota.com (diakses tgl 15 Nov 2008)
<http://indos.org.cuhn>. (diakses tgl 15 Nov 2008)